



PrADa

Profil dan Analisis Daerah

**Provinsi:
Sumatera Barat, 2017**

Kedeputan Bidang
Pengembangan Regional

Tim Penyusun



Penanggung Jawab:
Ir. Rudy S. Prawiradinata, MCRP, Ph.D
Deputi Bidang Pengembangan Regional



Ketua Tim Pelaksana:
Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D
Direktur Pengembangan Wilayah
dan Kawasan



Anggota Tim Pelaksana:
Tri Dewi Virgianti, ST, MEM
Direktur Perkotaan, Perumahan dan
Permukiman



Anggota Tim Pelaksana:
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D
Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi
dan Perdesaan



Anggota Tim Pelaksana:
Ir. Aryawan Soetiarso Poetro, MSI
Direktur Otonomi Daerah



Anggota Tim Pelaksana:
Uke Muhammad Hussein, SSI, MPP
Direktur Tata Ruang dan Pertanahan

**Kedeputan Bidang
Pengembangan Regional**



Kata Pengantar



Di samping pertumbuhan (*growth*), keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara juga diukur melalui dimensi pemerataan (*equality*). Pembangunan yang semata-mata mengejar pertumbuhan diyakini akan menghasilkan berbagai kesenjangan atau ketimpangan, baik dalam bentuk kesenjangan dalam kesejahteraan individual masyarakat (antara kelompok kaya dengan kelompok miskin) maupun dalam bentuk kesenjangan antardaerah atau ketimpangan wilayah. Kesenjangan wilayah itu sendiri dapat diidentifikasi dalam berbagai manifestasi. Oleh sebab itu dalam ilmu kewilayahan dikenal berbagai macam kesenjangan, misalnya kesenjangan yang dilatarbelakangi perbedaan aktivitas ekonomi seperti antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan, kesenjangan yang dipengaruhi faktor kondisi alam seperti antara wilayah pesisir dengan wilayah pedalaman, atau kesenjangan yang terjadi akibat faktor administratif seperti kesenjangan antar provinsi dan kesenjangan antar kabupaten/kota.

Dalam konteks Indonesia, kesenjangan antarwilayah menjadi fokus utama dalam kerangka pembangunan wilayah. Hal ini dapat dilihat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, dimana disebutkan bahwa arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Selanjutnya dalam perspektif pembangunan wilayah, upaya untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah tidak dapat dilakukan hanya dengan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, akan tetapi lebih jauh dari pada itu yakni pentingnya untuk memperhatikan faktor-faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri, seperti pendidikan, kesehatan, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran serta ketersediaan infrastruktur pendukung wilayah lainnya. Faktor-faktor tersebut, merupakan kunci utama bagi daerah dalam upaya mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya, terlepas dari adanya perbedaan *resources* yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.

Profil dan Analisis Daerah (PrADa) yang disusun ini dapat menjadi salah satu referensi bagi para pemangku kepentingan pembangunan dalam upaya mengurangi tingkat kesenjangan pembangunan antarwilayah, melalui program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah dengan fokus utama pada aspek pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur, industri dan pariwisata.

Jakarta, Desember 2017
Deputi Bidang Pengembangan
Regional,

Rudy S. Prawiradinata

**Kedeputan Bidang
Pengembangan Regional**



DAFTAR ISI**KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI**

Bab-1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	4
1.3. Manfaat	5
Bab-2 METODOLOGI	6
2.1. Lingkup Kegiatan	7
2.2. Metode Analisis	7
Bab-3 PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO REGIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT	11
3.1. Perkembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat	12
3.2. Tingkat Kemiskinan	13
3.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	14
3.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	15
Bab-4 PrADa PROVINSI SUMATERA BARAT	16
4.1. Tematik Pendidikan	19
4.2. Tematik Kesehatan	27
4.3. Tematik Penanggulangan Kemiskinan	35
4.4. Tematik Perumahan dan Permukiman	42
4.5. Tematik Ketahanan Pangan	52
4.6. Tematik Ketahanan Energi	61
4.7. Tematik Infrastruktur	69
4.8. Tematik Industri, Pariwisata, dan Sektor Unggulan	76
Bab-5 PENUTUP	82
5.1. Kesimpulan	83
5.2. Rekomendasi	83



Bab-1

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Di samping pertumbuhan (*growth*), keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara juga diukur melalui dimensi pemerataan (*equality*). Pembangunan yang semata-mata mengejar pertumbuhan diyakini akan menghasilkan berbagai kesenjangan atau ketimpangan, baik dalam bentuk kesenjangan dalam kesejahteraan individual masyarakat (antara kelompok kaya dengan kelompok miskin) maupun dalam bentuk kesenjangan antar-daerah atau ketimpangan wilayah. Berkaitan dengan itu, menurut Sumitro Djojohadikusumo, dua dari tiga masalah pembangunan jangka panjang Indonesia adalah bersangkutan dengan masalah ketimpangan atau kesenjangan, yaitu ketimpangan pada perimbangan kekuatan di antara golongan-golongan masyarakat dan ketidakseimbangan ekonomi antar-daerah. Satu masalah lainnya adalah persoalan lapangan kerja produktif dan pengangguran (Djojohadikusumo, 1994:191). Maka dapat dipahami jika masalah ketimpangan atau kesenjangan antar-daerah selalu menjadi salah satu isu utama pembangunan daerah di Indonesia.

Kesenjangan dalam perkembangan ekonomi adalah merupakan suatu keniscayaan, baik dalam tataran antar-negara maupun antar-daerah di suatu negara. Fenomena kesenjangan terjadi karena adanya perbedaan dalam alokasi berbagai faktor pertumbuhan ekonomi. Hirschman melihat bahwa kesenjangan bukan hanya terjadi dalam perkembangan ekonomi antar-negara, tetapi terjadi juga kesenjangan dalam perkembangan wilayah. Jika di dunia ini terdapat negara-negara maju dan negara-negara terbelakang, maka dalam suatu negara pun terdapat wilayah-wilayah yang maju dan wilayah-wilayah yang terbelakang (Nurzaman, 2002:91).

Kesenjangan wilayah itu sendiri dapat diidentifikasi dalam berbagai manifestasi. Oleh sebab itu dalam ilmu kewilayahan dikenal berbagai macam kesenjangan, misalnya kesenjangan yang dilatarbelakangi perbedaan aktivitas ekonomi seperti antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan, kesenjangan yang dipengaruhi faktor kondisi alam seperti antara wilayah pesisir dengan wilayah pedalaman, atau kesenjangan yang terjadi akibat faktor administratif seperti kesenjangan antar provinsi dan kesenjangan antar kabupaten/kota dan seterusnya. Dalam kerangka yang lebih luas, kesenjangan yang terjadi di Indonesia, khususnya antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) lebih dilatarbelakangi oleh hampir seluruh perbedaan tersebut, yaitu aktivitas ekonomi, kondisi alam dan juga administratif.

Asal dari kesenjangan antar-daerah atau kesenjangan wilayah menurut Myrdal berakar pada persoalan non ekonomi dan berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif ini mendorong terpusatnya pembangunan pada wilayah-wilayah yang memberikan harapan laba yang tinggi, sedangkan wilayah-wilayah yang tidak menjanjikan laba yang tinggi akan tetap terbelakang atau mengalami stagnasi (Myrdal dalam Roudo, 2004:25).

Banyak sekali teori dan konsep yang berusaha menjelaskan mekanisme terjadinya kesenjangan serta mekanisme untuk mengurangi kesenjangan itu. Teori *polarization effect* misalnya menjelaskan kecenderungan semakin besarnya kesenjangan akibat terjadinya aliran faktor produksi dari wilayah yang terbelakang ke wilayah maju, sementara teori *trickling down effect* menjelaskan kecenderungan kesenjangan yang semakin mengecil karena berpindahannya sumber daya (terutama modal) ke wilayah yang terbelakang akibat sudah tidak efisiennya lagi ekonomi di wilayah yang sudah maju. Dalam konsep yang lain namun masih dalam gagasan yang sama, fenomena membesarnya kesenjangan disebut sebagai akibat dari terjadinya *backwash effect*, sedangkan fenomena mengecilnya kesenjangan adalah akibat terjadinya *spread effect*. Pandangan optimis diwakili oleh Hirschman yang berpendapat bahwa pada suatu saat *trickling down effect* akan bekerja lebih kuat daripada *polarization effect* (sehingga kesenjangan akan berkurang), sementara Myrdal mewakili pandangan yang lebih pesimis karena menurutnya *backwash effect* akan selalu lebih besar daripada *spread effect* (yang artinya kesenjangan akan cenderung semakin besar).

Jadi permasalahannya meskipun kesenjangan adalah suatu keniscayaan dalam perkembangan wilayah, namun kecenderungan semakin membesarnya kesenjangan (divergensi) atau semakin mengecilnya kesenjangan (konvergensi) selalu menjadi bahan kajian yang menarik. Kuznets yang merupakan pelopor dalam analisis empirik terhadap pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju, menemukan bahwa pada tahap-tahap awal pertumbuhan distribusi pendapatan akan cenderung memburuk, tetapi akan membaik pada tahap-tahap berikutnya. Observasi inilah yang dikenal luas sebagai konsep kurva U-terbalik dari Kuznets (Kuncoro, 2004:129).

Pada tingkat wilayah atau regional, adalah Williamson yang mencoba memahami fenomena divergensi dan konvergensi wilayah secara empirik, yaitu dengan mengamati tingkat kesenjangan di berbagai negara yang mempunyai tingkat perkembangan (dinyatakan dengan PDRB) yang berbeda (Nurzaman, 2002:95). Williamson menemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas atau kesenjangan regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu. Namun pada tahap pertumbuhan ekonomi yang lebih matang, tampak adanya keseimbangan antar-daerah dan disparitas berkurang secara signifikan (Kuncoro, 2004:133). Dapat dikatakan bahwa Williamson adalah yang pertama kali secara eksplisit memberi dimensi spasial kepada kurva U-terbaliknya Kuznets, yaitu dengan tidak memfokuskan kepada kesenjangan pendapatan rumah tangga melainkan kepada kesenjangan antar-wilayah di tingkat pendapatan perkapita.

Dalam konteks Indonesia, kesenjangan antarwilayah menjadi fokus utama dalam kerangka pembangunan wilayah. Hal ini dapat dilihat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, dimana disebutkan bahwa arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah tersebut bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam, penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata dengan memperhatikan posisi geo-strategis regional dan global yang memanfaatkan secara optimal keberadaan *Sea Lane of Communication* (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk dapat mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah, harus dapat didukung dengan program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan pembangunan dimasing-masing daerah. Hal ini mengingat bahwa, masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan oleh karenanya dalam menyusun usulan program/kegiatan yang akan dirumuskan tidak dapat disamaratakan (simetris) dan harus menggunakan pendekatan yang berbeda untuk setiap daerah (asimetris).

Selanjutnya untuk dapat menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah, dibutuhkan kajian yang mendalam dan komprehensif untuk masing-masing daerah, khususnya yang terkait dengan indikator utama pembangunan daerah baik melalui pendekatan statistik maupun spasial. Sejalan dengan hal tersebut, Kedepatian Bidang Pengembangan Regional, telah melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksudkan di atas, dan untuk selanjutnya hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka merumuskan program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah.

2.2. Tujuan

- (1). Mengumpulkan dan menganalisis data-data statistik yang terkait dengan indikator utama pembangunan daerah, baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder;
- (2). Memetakan data-data yang diperoleh dari hasil analisis statistik/tabular ke dalam bentuk *Geographic Information System* (GIS);
- (3). Melaksanakan FGD dengan daerah, tujuannya adalah untuk mengetahui berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan tematik pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur, industri dan pariwisata.
- (4). Melaksanakan konsinyiring/*workshop* di pusat (Jakarta), tujuannya adalah untuk memperoleh berbagai masukan/saran untuk penyempurnaan penyusunan PrADa, termasuk membahas hasil-hasil pelaksanaan FGD di daerah;
- (5). Menyusun rekomendasi kebijakan dalam bentuk indikasi program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah;
- (6). Menyusun laporan PrADa dalam rangka, yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka mempertajam perencanaan pembangunan nasional yang berbasis kewilayahan.

1.3. Manfaat

Manfaat dari terlaksana dan tersusunnya PrADa ini, bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mensinergikan pelaksanaan pembangunan nasional/daerah, serta untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan utamanya dalam menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah. Disamping itu model analisis melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) yang dipergunakan dalam kegiatan penyusunan PrADa ini dapat menjadi salah satu instrumen dalam rangka mempersiapkan penyusunan *background study* RPJMN 2020-2024, yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Bab-2

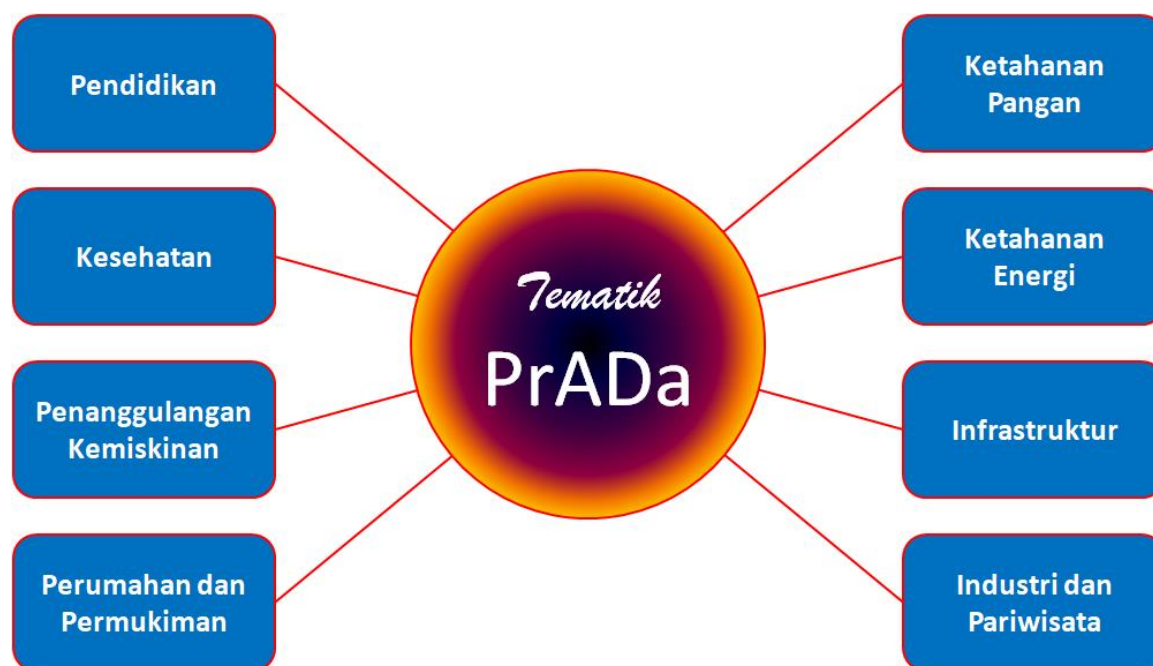
METODOLOGI



2.1. Lingkup Kegiatan

Kegiatan penyusunan PrADa ini akan difokuskan pada tematik pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur, industri dan pariwisata.

Gambar 2.1
Lingkup Tematik Penyusunan PrADa

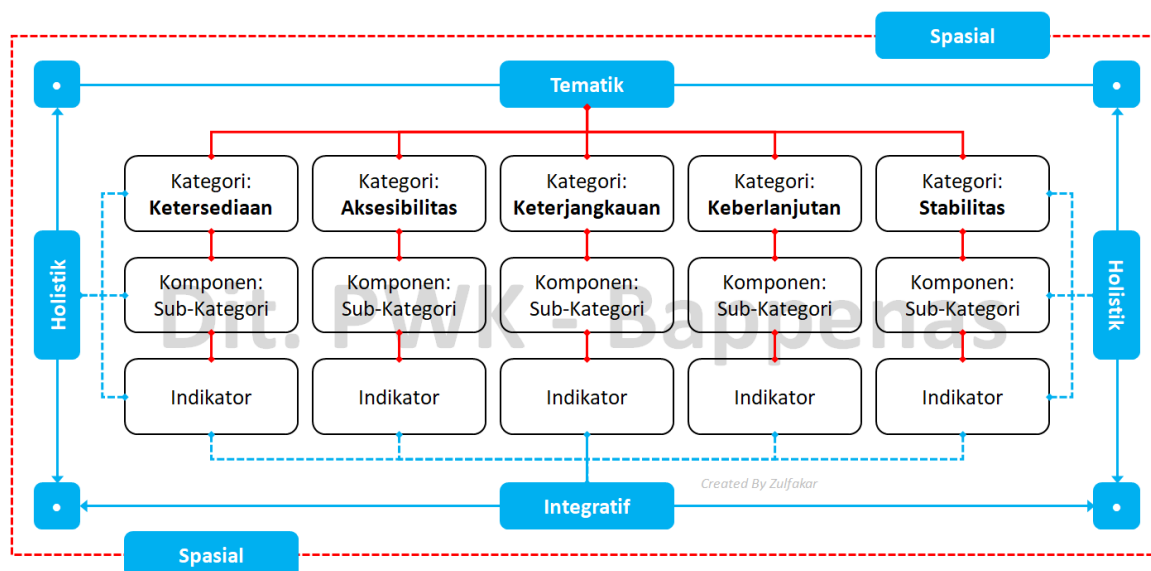


2.2. Metode Analisis

Model analisis yang dipergunakan dalam kegiatan ini melalui metode analisis dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Adapun yang dimaksud dengan "**Tematik**" adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan; "**Holistik**" adalah penjabaran tematik program ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan; "**Integratif**" adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program yang dilihat dari peran kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan; dan "**Spasial**" adalah penjabaran program dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.¹

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Gambar 2.2
Metode Analisis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)
Penyusunan PrADa



Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas.

Lingkup substantif suatu tematik dalam kegiatan ini, dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori yang saling terkait satu sama lainnya (baik secara vertical maupun horizontal), yaitu (1) **ketersediaan**, digunakan untuk menganalisis ketersediaan layanan suatu tematik; (2) **aksesibilitas**, digunakan untuk menganalisis tingkat kemudahan masyarakat dalam mengakses, memperoleh dan/atau menggunakan layanan suatu tematik; (3) **keterjangkauan**, dipergunakan untuk menganalisis keterjangkauan masyarakat dari sisi biaya dalam rangka memperoleh dan/atau menggunakan layanan suatu tematik; (4) **keberlanjutan**, digunakan untuk menganalisis jaminan keberlanjutan terhadap layanan suatu tematik; dan (5) **stabilitas**, digunakan untuk menganalisis tingkat resiko bencana yang dapat menyebabkan terhentinya layanan suatu tematik. Selanjutnya penerapan metode analisis melalui pendekatan THIS ini, sebagaimana yang disajikan dalam Gambar 2.2 tersebut diatas, secara ilustratif diuraikan sebagai berikut:

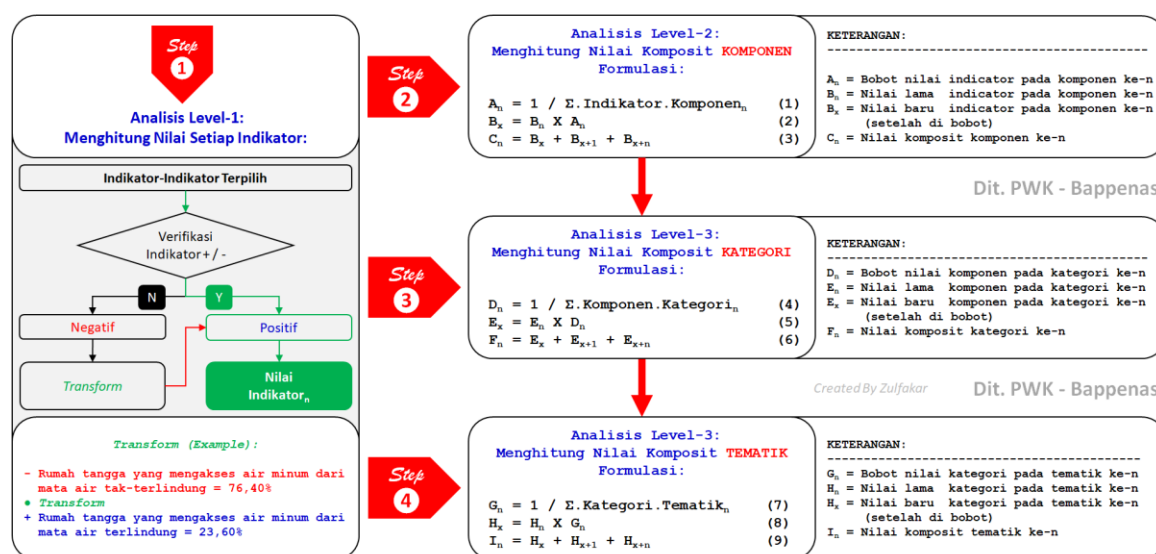
- **Analisis Tematik (*Subject*)**

Tematik dalam kegiatan ini difokuskan pada tematik pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur, industri dan pariwisata.

- **Analisis Holistik (*Technocratic Planning*),**

Analisis holistik (*technocratic planning*), merupakan metode analisis hulu-hilir (komprehensif) yang secara **vertical** dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing wilayah, mulai dari level indikator, komponen, kategori sampai dengan tematik. Adapun alur proses dan formulasi dalam melakukan analisis holistik ini disajikan pada Gambar 2.3 sebagai berikut:

Gambar 2.3
Formulasi Analisis Holistik (*Technocratic Planning*)
Penyusunan PrADa



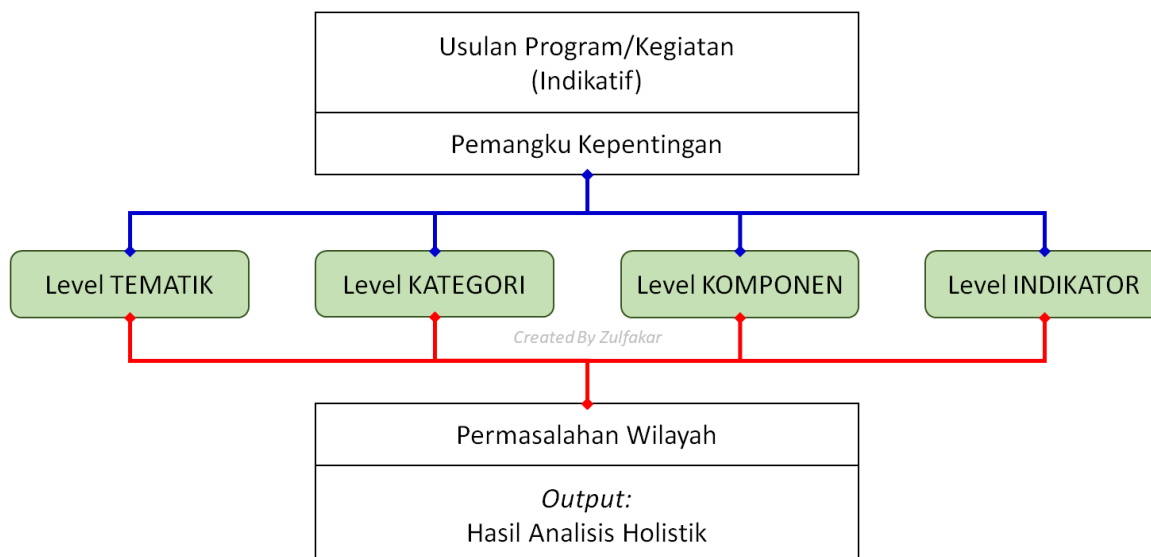
Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas.

- **Analisis Integratif (*Coordination/Who's Doing What*)**

Analisis integratif (*coordination/who's doing what*), merupakan metode analisis yang secara **horizontal** digunakan untuk menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah, disertai dengan pemetaan peran dari para pemangku kepentingan dan pendanaannya (*optional*), mulai dari level indikator komponen, kategori sampai dengan tematik.

Dalam menerapkan analisis integratif ini terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah melakukan analisis holistik. Hasil analisis holistik inilah yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan langkah tindak lanjut dan peran para pemangku kepentingan sesuai tingkat permasalahannya, mulai dari level indikator komponen, kategori sampai dengan tematik. Adapun alur proses dan formulasi dalam melakukan analisis integratif ini disajikan pada gambar 2.4 sebagai berikut:

Gambar 2.4
Analisis Integratif (*Coordination/Who's Doing What*)
Penyusunan PrADa

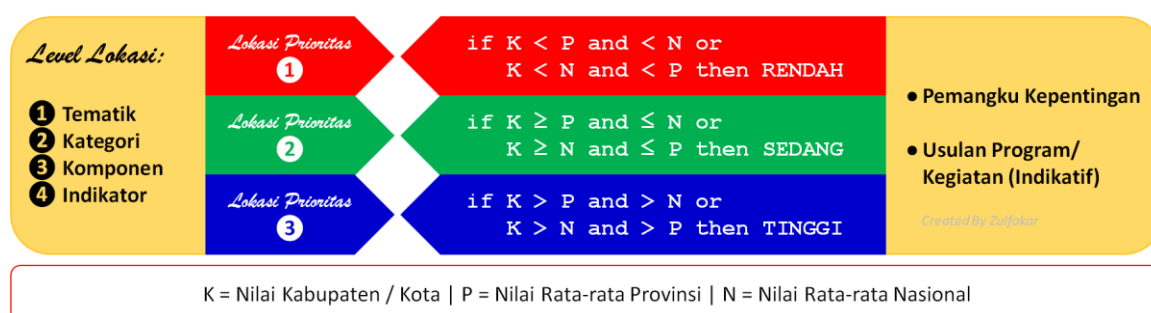


Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas.

- **Analisis Spasial (*Spatially Bound*)**

Analisis spasial (*spatially bound*) merupakan metode analisis yang digunakan untuk memetakan lokasi-lokasi yang akan menjadi prioritas, yang akan terbagi ke dalam 3 (tiga) kelas, yaitu daerah dengan tingkat capaian rendah, sedang dan tinggi. Adapun alur proses dan formulasi dalam melakukan analisis spasial ini disajikan pada Gambar 2.5 sebagai berikut:

Gambar 2.5
Analisis Spasial (*Spatially Bound*) Penyusunan PrADa



Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas.

Bab-3

PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO REGIONAL Provinsi Sumatera Barat



3.1. Perkembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat ²

Dalam kurun waktu tiga triwulan terakhir, pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat cenderung tumbuh stabil di kisaran 5,4%. Realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2017 tercatat sebesar 5,37% atau sedikit melambat dibandingkan triwulan III 2017 sebesar 5,39%. Sumber penopang pertumbuhan ekonomi terutama berasal dari perbaikan kinerja konsumsi rumah tangga, dan ekspor. Tingginya konsumsi seiring libur akhir tahun menjadi penopang konsumsi rumah tangga. Dari sisi ekspor, kenaikan volume produksi CPO mendorong peningkatan kinerja ekspor luar negeri pada triwulan laporan. Sementara itu, kelompok lainnya seperti konsumsi pemerintah dan investasi justru mengalami perlambatan kinerja. Menurunnya tingkat realisasi belanja pemerintah baik di sisi penerimaan maupun pengeluaran menjadi penyebab menurunnya kinerja konsumsi pemerintah. Lebih lanjut, terjadinya penurunan realisasi belanja modal APBN dan APBD serta penurunan realisasi PMDN berdampak pada melambatnya investasi.

PENGELUARAN	2016					2017				
	TW I %	TW II %	TW III %	TW IV %	TOTAL %	TW I %	TW II %	TW III %	TW IV %	TOTAL %
01. Konsumsi Rumah Tangga	4.40	4.36	4.42	4.38	4.39	4.43	4.59	4.29	5.48	4.70
02. Konsumsi LNPR	6.46	8.51	3.68	0.46	4.67	0.23	5.82	6.76	4.56	4.36
03. Konsumsi Pemerintah	4.43	4.75	-7.07	-0.07	0.02	1.07	4.00	6.25	-9.40	-0.80
04. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.48	7.24	5.26	5.98	6.31	4.99	2.94	6.63	2.76	4.31
05. Perubahan Inventori	897.53	459.75	0.43	816.83	-2.34	-31.76	-60.59	76.19	1.15	-37.15
06. Ekspor Barang dan Jasa	-8.57	-27.10	-3.51	-4.85	-11.50	23.73	34.00	3.02	8.59	16.49
07. Impor Barang dan Jasa	-33.11	-20.81	-13.00	-54.08	-30.90	17.91	-13.64	-3.16	71.82	12.36
08. Net Ekspor Antar Daerah	202.50	-27.53	-42.40	11.64	-21.00	-71.53	3,036.00	46.50	-48.28	-7.85
PDRB	5.59	5.85	4.81	4.87	5.27	5.01	5.36	5.39	5.37	5.29

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2017 utamanya ditopang oleh transportasi dan pergudangan sebagai dampak peningkatan permintaan transportasi seiring momen libur akhir tahun. Sementara itu, lapangan usaha utama lainnya seperti pertanian, perdagangan dan industri pengolahan justru melambat. Perlambatan lapangan usaha pertanian dipengaruhi oleh tingginya curah hujan dan serangan hama yang berdampak pada berkurangnya produksi. Lapangan usaha perdagangan tertahan seiring penurunan penjualan kendaraan bermotor. Khusus untuk industri pengolahan, penurunan kapasitas produksi akibat turunnya permintaan berdampak pada perlambatan kinerja lapangan usaha tersebut.

LAPANGAN USAHA	2016					2017				
	TW I %	TW II %	TW III %	TW IV %	TOTAL %	TW I %	TW II %	TW III %	TW IV %	TOTAL %
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.38	2.65	-0.44	0.82	2.01	4.12	4.18	3.57	1.82	3.40
B. Pertambangan dan Penggalian	-3.17	-0.48	2.74	9.26	2.00	2.98	1.28	-0.02	0.37	1.13
C. Industri Pengolahan	1.68	7.23	5.93	4.74	4.90	3.84	0.46	3.03	1.81	2.26
D. Pengadaan Listrik dan Gas	14.09	15.01	14.80	1.32	10.94	2.18	0.25	5.71	8.06	4.06
E. Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	4.39	5.74	7.84	7.58	6.40	5.97	5.74	1.76	7.17	3.96
F. Konstruksi	5.60	6.14	7.14	7.40	6.59	7.68	5.85	7.00	8.33	7.23
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.28	4.64	3.91	5.89	5.41	4.93	6.67	7.72	6.65	6.50
H. Transportasi dan Pergudangan	7.69	9.46	9.21	4.36	7.67	5.04	6.85	6.65	9.95	7.10
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.83	10.43	9.43	8.87	9.62	8.26	9.40	8.33	9.04	8.76
J. Informasi dan Komunikasi	7.07	9.79	9.32	11.45	9.40	7.43	9.12	6.90	11.52	8.74
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5.20	9.81	6.93	10.22	8.03	2.72	5.13	2.40	-1.57	2.11
L. Real Estat	6.87	6.47	4.64	3.68	5.37	4.92	7.81	3.64	1.78	4.49
M.N. Jasa Perusahaan	5.91	4.82	4.06	5.02	4.94	5.21	7.28	5.72	2.68	5.19
O. Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.22	6.95	5.84	1.09	4.96	2.11	3.56	4.85	7.34	4.49
P. Jasa Pendidikan	9.07	7.76	8.49	6.19	7.85	8.33	10.95	10.78	9.68	9.94
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.29	6.69	5.28	3.86	5.47	10.68	10.20	8.09	5.69	8.58
R.S.T.U. Jasa Lainnya	9.00	8.98	9.35	10.05	9.35	7.35	8.87	8.87	6.74	7.95
PDRB	5.59	5.85	4.81	4.87	5.27	5.01	5.36	5.39	5.37	5.29

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

² Kajian Ekonomi Regional, Bank Indonesia.

3.2. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan provinsi Sumatera Barat periode Maret 2017, lebih rendah dari nasional, yaitu sebesar 6,87% dan nasional 10,64%. Sementara itu, untuk tingkat kemiskinan kabupaten/kota di wilayah provinsi Sumatera Barat disajikan sebagai berikut:

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Periode Maret 2017						
Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional						
NO.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)	Index Kedalaman Kemiskinan (P1)	Index Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
01.	Kepulauan Mentawai	12.95	14.67	2.58	0.70	280,695.00
02.	Solok	33.33	9.06	1.11	0.20	400,887.00
03.	Padang Pariaman	34.70	8.46	1.13	0.23	385,736.00
04.	Pesisir Selatan	35.53	7.79	1.07	0.25	390,955.00
05.	Agam	36.57	7.59	0.96	0.20	327,004.00
06.	Pasaman	20.38	7.41	0.80	0.15	320,478.00
07.	Sijunjung	16.83	7.35	1.12	0.23	365,074.00
08.	Pasaman Barat	30.84	7.26	1.17	0.27	382,820.00
09.	Solok Selatan	11.89	7.21	0.89	0.17	347,667.00
10.	Lima Puluh Kota	26.93	7.15	1.09	0.31	370,506.00
11.	Dharmasraya	15.63	6.68	0.66	0.14	398,408.00
12.	Kota Padang Panjang	3.22	6.17	0.94	0.22	424,298.00
13.	Kota Payakumbuh	7.72	5.88	0.75	0.12	441,736.00
14.	Tanah Datar	19.27	5.56	0.55	0.11	361,037.00
15.	Kota Bukittinggi	6.75	5.35	0.57	0.10	441,087.00
16.	Kota Pariaman	4.49	5.20	0.59	0.14	412,231.00
17.	Kota Padang	43.75	4.74	0.54	0.11	482,763.00
18.	Kota Solok	2.50	3.66	0.62	0.23	413,297.00
19.	Kota Sawah Lunto	1.23	2.01	0.29	0.07	337,682.00
SUMATERA BARAT		364.51	6.87	1.00	0.23	453,612.00
INDONESIA		7,771.00	10.64	1.83	0.48	361,496.00
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)						
Tingkat kemiskinan kabupaten/kota, di ATAS provinsi dan nasional.						
Tingkat kemiskinan kabupaten/kota, di ATAS provinsi, akan tetapi berada di BAWAH nasional.						
Tingkat kemiskinan kabupaten/kota, di BAWAH provinsi dan nasional.						

3.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 menempati urutan ke 9 dari 34 provinsi, dengan nilai IPM sebesar 70,73 atau lebih tinggi dari nasional yaitu sebesar 70,18. Sementara itu, untuk indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di wilayah provinsi Sumatera Barat disajikan sebagai berikut:

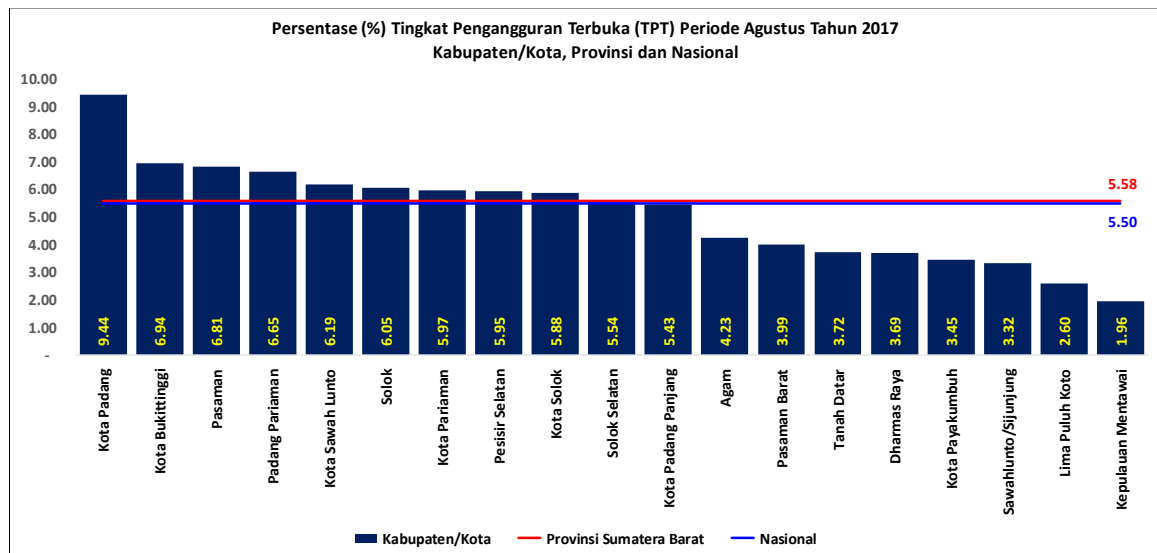
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya Tahun 2016							
Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional							
NO.	Kabupaten/Kota	AHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran (Ribu Rp/Tahun)	IPM	Pertumbuhan (Persen)
01.	Kepulauan Mentawai	64.36	11.74	6.52	5,771.00	58.27	1.50
02.	Pasaman	66.40	12.71	7.64	7,678.00	64.57	0.87
03.	Sijunjung	65.33	12.27	7.50	9,895.00	66.01	1.08
04.	Pasaman Barat	67.09	12.67	7.84	8,393.00	66.03	1.18
05.	Solok Selatan	66.78	12.51	7.99	9,802.00	67.47	0.57
06.	Solok	67.50	13.00	7.58	9,664.00	67.67	0.82
07.	Lima Puluh Kota	69.27	13.25	7.92	8,936.00	68.37	1.07
08.	Pesisir Selatan	70.11	13.05	8.12	8,605.00	68.39	0.47
09.	Padang Pariaman	67.80	13.55	7.00	10,455.00	68.44	0.59
10.	Tanah Datar	68.93	13.46	8.12	10,296.00	70.11	0.89
11.	Dharmasraya	70.30	12.39	8.23	10,781.00	70.25	0.59
12.	Agam	71.44	13.73	8.18	9,111.00	70.36	0.74
13.	Kota Sawah Lunto	69.33	13.05	9.92	9,051.00	70.67	1.15
14.	Kota Pariaman	69.63	14.50	10.09	12,141.00	75.44	0.61
15.	Kota Padang Panjang	72.45	15.02	11.42	9,804.00	76.50	0.69
16.	Kota Solok	72.83	14.28	10.79	11,519.00	77.07	0.31
17.	Kota Payakumbuh	73.03	14.22	10.30	12,705.00	77.56	0.17
18.	Kota Bukittinggi	73.60	14.93	10.98	12,475.00	79.11	0.49
19.	Kota Padang	73.19	15.87	11.24	13,721.00	81.06	0.87
SUMATERA BARAT		68.73	13.79	8.59	10,126.00	70.73	1.07
INDONESIA		70.90	12.72	7.95	104,201.00	70.18	0.91

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

	Tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota, di BAWAH provinsi DAN nasional.
	Tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota, di BAWAH provinsi, akan tetapi berada di ATAS nasional.
	Tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota, di ATAS provinsi DAN nasional.

3.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

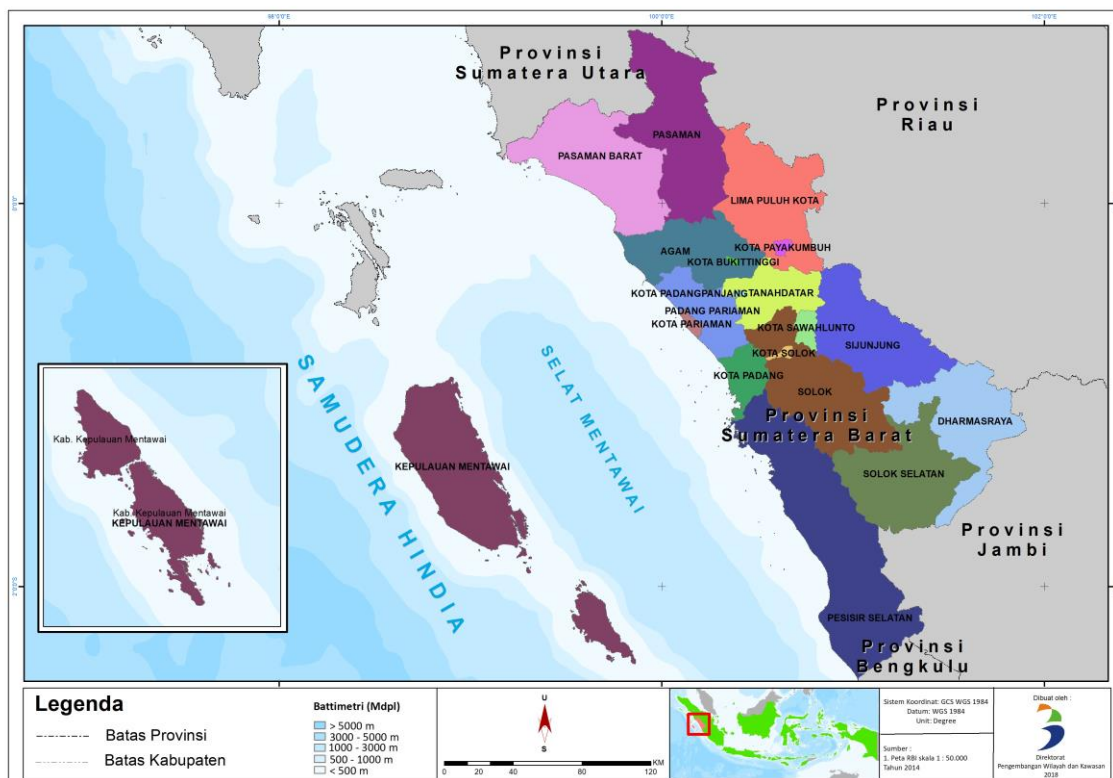
Tingkat pengangguran terbuka provinsi Sumatera Barat periode Agustus 2017, lebih tinggi dari nasional, yaitu sebesar 5,58% dan nasional 5,50%. Sementara itu, untuk tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di wilayah provinsi Sumatera Barat disajikan sebagai berikut:



Bab-4

PrADa

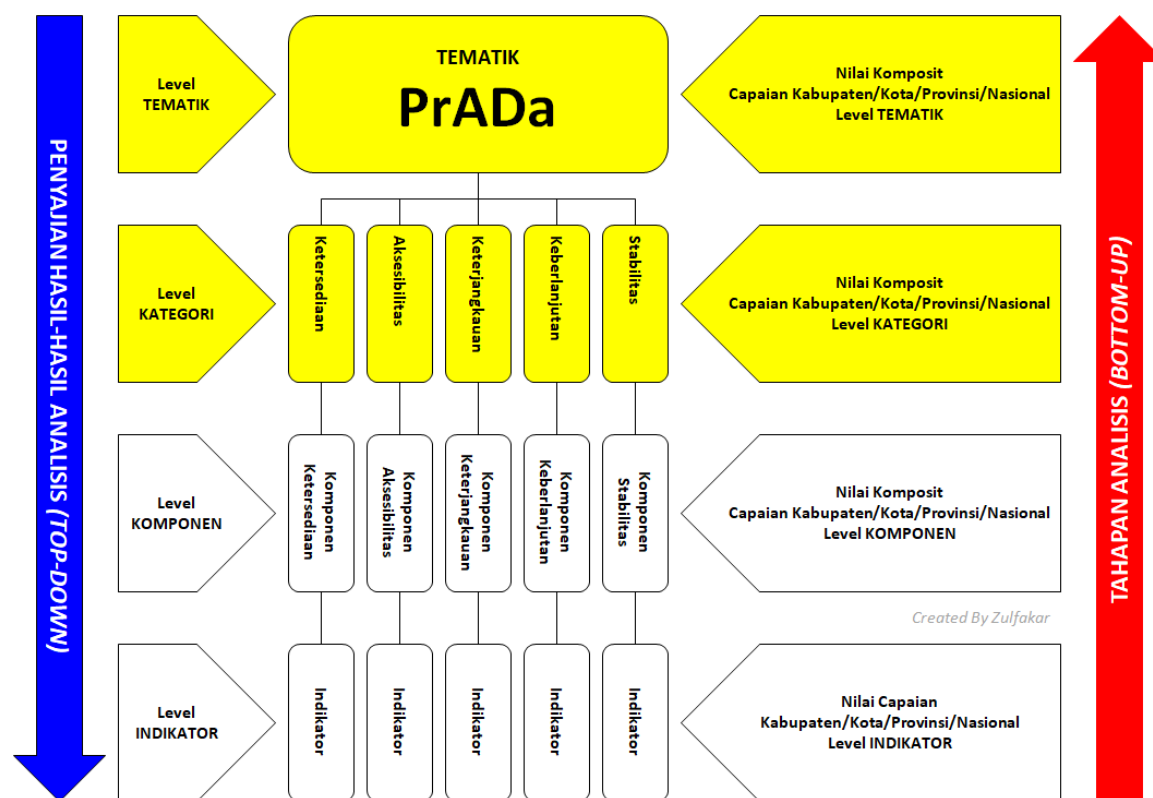
Provinsi Sumatera Barat



Model analisis yang dipergunakan dalam penyusunan PrADa ini dilakukan melalui pendekatan metode analisis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Tematiknya adalah pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan pangan, infrastruktur, ketahanan energi, industri dan pariwisata.

Holistik (*technoratic planning*) terbagi ke dalam 4 level analisis yang saling terkait satu dengan yang lainnya, dimulai dari level indikator, komponen, kategori, dan tematik (*bottom-up*). Integratif (*coordination/who's doing what*) untuk memetakan peran para pemangku kepentingan (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Swasta) termasuk merumuskan program/kegiatan (indikatif), mulai dari level indikator, komponen, kategori, dan tematik. Spasial (*spatially bound*) untuk memetakan wilayah-wilayah dengan tingkat capaian terhadap indikator, komponen, kategori dan tematik rendah, sedang atau tinggi.

Gambar 4.1
Struktur dan Lingkup Penyajian Hasil Analisis
Penyusunan PrADa



Mengacu kepada Gambar 4.1 tersebut di atas, terlihat bahwa kalau dalam proses analisis menggunakan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*), yang dimulai dari level indikator, komponen, kategori sampai dengan tematik, maka dalam penyajian hasil analisis justru sebaliknya, yaitu menggunakan pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*), dimulai dari level tematik sampai dengan level kategori.

Analisis level tematik, bertujuan untuk memetakan kabupaten/kota di wilayah provinsi Sumatera Barat yang memiliki nilai komposit suatu tematik dengan tingkat capaian RENDAH, SEDANG dan TINGGI. Nilai komposit suatu tematik berasal dari 5 (lima) unsur kategori pembentuknya yaitu (1) ketersediaan, (2) aksesibilitas, (3) keterjangkauan, (4) keberlanjutan, dan (5) stabilitas.

Sementara itu, analisis level kategori, bertujuan untuk memetakan kabupaten/kota di wilayah provinsi Sumatera Barat yang memiliki nilai komposit kategori dengan tingkat capaian RENDAH, SEDANG dan TINGGI. Nilai komposit setiap kategori berasal dari masing-masing unsur komponen pembentuknya.

Adapun, dalam menentukan kabupaten/kota memiliki nilai komposit dengan tingkat capaian suatu tematik/kategori RENDAH, SEDANG dan TINGGI, ditentukan dengan 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:

- **Tingkat Capaian Tematik/Kategori Kabupaten/Kota RENDAH**

Jika, nilai komposit kabupaten/kota lebih kecil dari nilai provinsi DAN nilai nasional, ATAU nilai kabupaten/kota lebih kecil dari nilai nasional DAN lebih kecil dari nilai provinsi.

- **Tingkat Capaian Tematik/Kategori Kabupaten/Kota SEDANG**

Jika, nilai komposit kabupaten/kota lebih besar atau sama dengan nilai provinsi DAN lebih kecil atau sama dengan nilai nasional, ATAU nilai kabupaten/kota lebih besar atau sama dengan nilai nasional DAN lebih kecil atau sama dengan nilai provinsi.

- **Tingkat Capaian Tematik/Kategori Kabupaten/Kota TINGGI**

Jika, nilai komposit kabupaten/kota lebih besar dari nilai provinsi DAN nilai nasional, ATAU nilai kabupaten/kota lebih besar dari nilai nasional DAN lebih besar dari nilai provinsi.

4.1

Tematik:

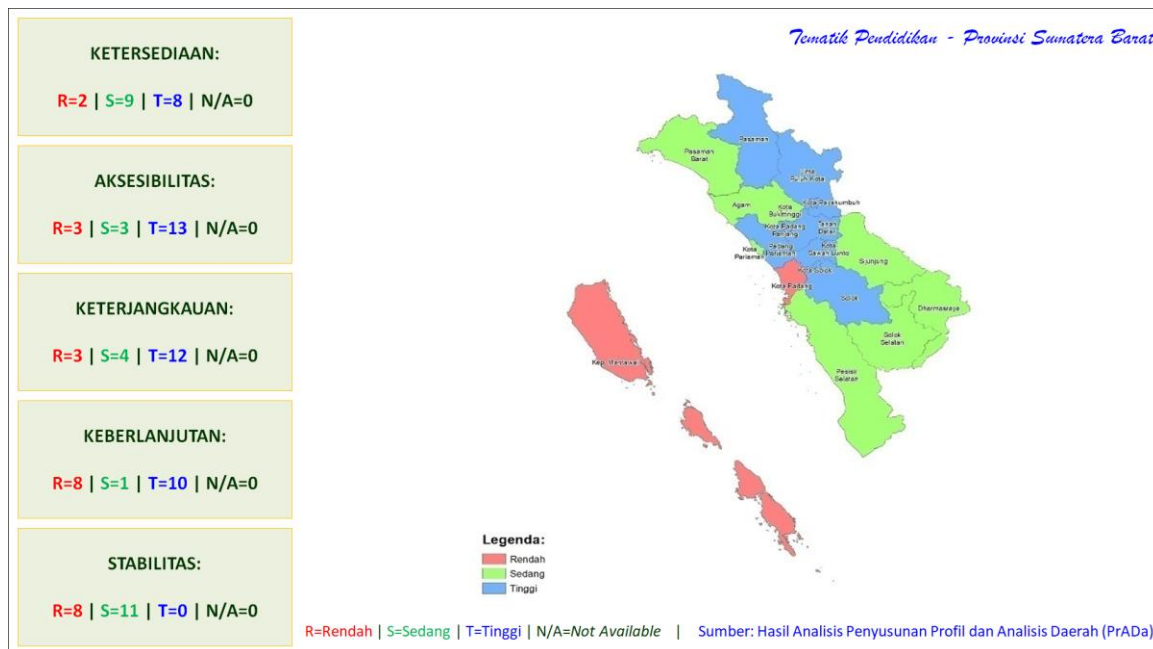
Pendidikan

Provinsi Sumatera Barat



Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Pendidikan Provinsi Sumatera Barat		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Murid • Guru • Sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio siswa/rombel SD; • Rasio siswa/rombel SMP; • Rasio siswa/rombel SMA; • Rasio rombel/ruang kelas SD; • Rasio rombel /ruang kelas SMP; • Rasio rombel /ruang kelas SMA; • Rasio siswa/guru SD; • Rasio siswa/guru SMP; • Rasio siswa/guru SMA. • Presentase guru SD kualifikasi; • Presentase guru SMP kualifikasi; • Presentase guru SMA kualifikasi. • Presentase kerusakan ruang kelas SD; • Presentase kerusakan ruang kelas SMP; • Presentase kerusakan ruang kelas SMA.
<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak layanan • Infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata jarak SD/SMP/SMA; • Desa beraspal.
<ul style="list-style-type: none"> • Keterjangkauan 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata pengeluaran keluarga untuk pendidikan per bulan.
<ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Partisipasi Murid SD/SMP/SMA;
<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Resiko bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota.

Hasil Analisis Tematik Pendidikan Provinsi Sumatera Barat



No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Pendidikan
01.	Kepulauan Mentawai	Rendah	Prioritas 1	<p style="text-align: center;">RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p style="text-align: center;">PENDIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">SUMATERA BARAT</p> <p style="text-align: center;">DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI</p> <p style="text-align: center;">KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN,</p> <p style="text-align: center;">KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS,</p> <p style="text-align: center;">RELATIF</p> <p style="text-align: center;">TINGGI HINGGA SEDANG</p> <p style="text-align: center;">RENDAH : 2 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">SEDANG : 8 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">TINGGI : 9 KABUPATEN/KOTA</p>
02.	Kota Padang	Rendah	Prioritas 1	
03.	Kota Pariaman	Sedang	Prioritas 2	
04.	Agam	Sedang	Prioritas 2	
05.	Pasaman Barat	Sedang	Prioritas 2	
06.	Pesisir Selatan	Sedang	Prioritas 2	
07.	Sijunjung	Sedang	Prioritas 2	
08.	Dharmasraya	Sedang	Prioritas 2	
09.	Solok Selatan	Sedang	Prioritas 2	
10.	Kota Bukittinggi	Sedang	Prioritas 2	
11.	Pasaman	Tinggi	Prioritas 3	
12.	Padang Pariaman	Tinggi	Prioritas 3	
13.	Solok	Tinggi	Prioritas 3	
14.	Lima Puluh Kota	Tinggi	Prioritas 3	
15.	Kota Payakumbuh	Tinggi	Prioritas 3	
16.	Kota Solok	Tinggi	Prioritas 3	
17.	Kota Padang Panjang	Tinggi	Prioritas 3	
18.	Tanah Datar	Tinggi	Prioritas 3	
19.	Kota Sawah Lunto	Tinggi	Prioritas 3	
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Pendidikan
01.	Kepulauan Mentawai	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya jumlah ruang kelas di beberapa kabupaten/kota untuk semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA untuk seluruh rombongan belajar; Tingkat kerusakan ruang kelas relatif tinggi di semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA; Rasio siswa/guru relatif masih belum mencukupi di semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA di beberapa kabupaten/kota; Kualifikasi guru minimal sarjana relatif sudah mencukupi, untuk semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dasar dan menengah; Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan unit sekolah baru (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA); Pembangunan Ruang Kelas Baru (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA); Rehabilitasi ruang belajar; Renovasi sekolah; Perekruitment guru PNS; Pemberian beasiswa bagi guru; Sertifikasi guru; Peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Kemen PAN RB; Pemerintah Daerah.
02.	Pesisir Selatan			
03.	Kota Padang	Sedang	Prioritas 2	
04.	Pasaman Barat			
05.	Pasaman			
06.	Dharmasraya			
07.	Solok Selatan			
08.	Lima Puluh Kota			
09.	Kota Bukittinggi			
10.	Kota Payakumbuh			
11.	Kota Solok			
12.	Kota Pariaman	Tinggi	Prioritas 3	
13.	Agam			
14.	Padang Pariaman			
15.	Sijunjung			
16.	Solok			
17.	Kota Padang Panjang			
18.	Tanah Datar			
19.	Kota Sawah Lunto			
<p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Pendidikan
01.	Kepulauan Mentawai	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jarak dari desa ke sekolah, di beberapa kabupaten/kota masih relatif jauh. Minimnya kondisi jalan desa yang beraspal. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dasar dan menengah; Pembangunan jalan dan jembatan; Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan unit sekolah baru (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA) di setiap desa/kelurahan; Pembangunan dan perbaikan jalan desa; Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Kementerian Perhubungan; Pemerintah Daerah.
02.	Pasaman Barat			
03.	Sijunjung			
04.	Dharmasraya	Sedang	Prioritas 2	
05.	Solok Selatan			
06.	Lima Puluh Kota			
07.	Kota Padang	Tinggi	Prioritas 3	
08.	Kota Pariaman			
09.	Agam			
10.	Pesisir Selatan			
11.	Pasaman			
12.	Padang Pariaman			
13.	Solok			
14.	Kota Bukittinggi			
15.	Kota Payakumbuh			
16.	Kota Solok			
17.	Kota Padang Panjang			
18.	Tanah Datar			
19.	Kota Sawah Lunto			
<p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Pendidikan	
01.	Kota Padang	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rata-rata biaya pendidikan relatif dapat terjangkau di semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA, walaupun demikian di beberapa kabupaten/kota biaya pendidikan masih relatif tinggi. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dasar dan menengah; Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Pemberian bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP); Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Pemerintah Daerah. 	
02.	Kota Bukittinggi				Kota Padang Panjang
03.	Kota Padang Panjang				
04.	Kepulauan Mentawai	Sedang	Prioritas 2		
05.	Kota Pariaman				
06.	Kota Payakumbuh				
07.	Kota Solok				
08.	Agam	Tinggi	Prioritas 3		
09.	Pasaman Barat				
10.	Pesisir Selatan				
11.	Pasaman				
12.	Padang Pariaman				
13.	Sijunjung				
14.	Dharmasraya				
15.	Solok Selatan				
16.	Solok				
17.	Lima Puluh Kota				
18.	Tanah Datar				
19.	Kota Sawah Lunto				

Legenda:
■ Rendah
■ Sedang
■ Tinggi

Sumber: Diolah dari berbagai sumber. Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keberlanjutan - Tematik Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keberlanjutan - Tematik Pendidikan
01.	Kepulauan Mentawai	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya jumlah siswa usia sekolah yang harusnya bersekolah di beberapa kabupaten/kota, untuk semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dasar dan menengah. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan proporsi anggaran pendidikan dasar dan menengah; Peningkatan layanan pendidikan. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Pemerintah Daerah.
02.	Kota Padang			
03.	Kota Pariaman			
04.	Agam			
05.	Sijunjung			
06.	Dharmasraya			
07.	Solok Selatan			
08.	Solok			
09.	Pasaman Barat	Sedang	Prioritas 2	
10.	Pesisir Selatan	Tinggi	Prioritas 3	
11.	Pasaman			
12.	Padang Pariaman			
13.	Lima Puluh Kota			
14.	Kota Bukittinggi			
15.	Kota Payakumbuh			
16.	Kota Solok			
17.	Kota Padang Panjang			
18.	Tanah Datar			
19.	Kota Sawah Lunto			
 <p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Pendidikan
01.	Kepulauan Mentawai	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks resiko bencana di beberapa kabupaten/kota relatif tinggi. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi bencana. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
02.	Kota Padang			
03.	Kota Pariaman			
04.	Agam			
05.	Pasaman Barat			
06.	Pesisir Selatan			
07.	Pasaman			
08.	Padang Pariaman			
09.	Sijunjung	Sedang	Prioritas 2	
10.	Dharmasraya			
11.	Solok Selatan			
12.	Solok			
13.	Lima Puluh Kota			
14.	Kota Bukittinggi			
15.	Kota Payakumbuh			
16.	Kota Solok			
17.	Kota Padang Panjang			
18.	Tanah Datar			
19.	Kota Sawah Lunto			
 <p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.2

Tematik:

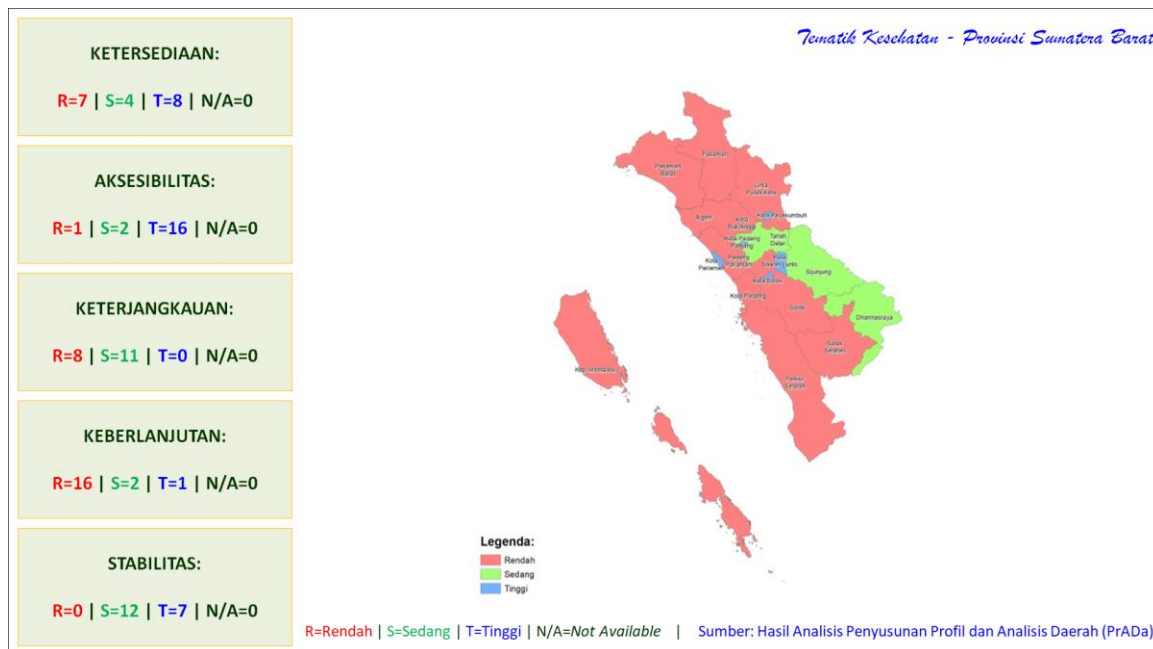
Kesehatan

Provinsi Sumatera Barat



Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Kesehatan Provinsi Sumatera Barat		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Kesehatan • Sarana Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio bidan per 100.000 penduduk; • Rasio dokter per 100.000 penduduk; • Rasio tenaga kesehatan lain per 100.000 penduduk. • Rasio posyandu per 3.000 penduduk; • Rasio puskesmas per 120.000 penduduk; • Rasio puskesmas pembantu per 3.000 penduduk; • Rasio rumah sakit per 240.000 penduduk.
<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kedekatan dengan fasilitas kesehatan terdekat 	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak ke puskesmas rawat inap; • Jarak ke puskesmas tanpa rawat inap; • Jarak ke puskesmas pembantu; • Jarak ke rumah sakit; • Jarak ke puskesmas praktik dokter.
<ul style="list-style-type: none"> • Keterjangkauan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan BPJS kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase kepemilikan BPJS kesehatan.
<ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penunjang ketersediaan tenaga kesehatan pada masa mendatang 	<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan perguruan tinggi di daerah yang memiliki jurusan dibidang kesehatan.
<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Resiko bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota.

Hasil Analisis Tematik Kesehatan Provinsi Sumatera Barat



No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Kesehatan		
01.	Agam	Rendah	Prioritas 1	<p style="text-align: center;">RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p style="text-align: center;">KESEHATAN</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">SUMATERA BARAT</p> <p style="text-align: center;">DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI</p> <p style="text-align: center;">KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN,</p> <p style="text-align: center;">KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS,</p> <p style="text-align: center;">RELATIF</p> <p style="text-align: center;">RENDAH</p> <p style="text-align: center;">RENDAH : 11 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">SEDANG : 3 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">TINGGI : 5 KABUPATEN/KOTA</p>		
02.	Kepulauan Mentawai					
03.	Kota Bukittinggi					
04.	Kota Padang					
05.	Lima Puluh Kota					
06.	Padang Pariaman					
07.	Pasaman					
08.	Pasaman Barat					
09.	Pesisir Selatan					
10.	Solok					
11.	Solok Selatan					
12.	Dharmasraya	Sedang	Prioritas 2			
13.	Sijunjung					
14.	Tanah Datar					
15.	Kota Padang Panjang	Tinggi	Prioritas 3			
16.	Kota Pariaman					
17.	Kota Payakumbuh					
18.	Kota Sawahlunto					
19.	Kota Solok					
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.						Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Kesehatan
01.	Agam	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya jumlah tenaga dokter, perawat dan bidan; • Belum meratanya penempatan dokter; • Belum meratanya fasilitas pelayanan kesehatan di daerah pedalaman, perbatasan dan terpencil; • Masih minimnya, kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan kesehatan. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan; - Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan jaringannya. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Kesehatan; - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi; - Pemerintah Daerah.
02.	Kota Padang			
03.	Padang Pariaman			
04.	Pasaman			
05.	Pasaman Barat			
06.	Pesisir Selatan			
07.	Solok			
08.	Kota Bukittinggi	Sedang	Prioritas 2	
09.	Lima Puluh Kota			
10.	Solok Selatan			
11.	Tanah Datar			
12.	Dharmasraya	Tinggi	Prioritas 3	
13.	Kepulauan Mentawai			
14.	Kota Padang Panjang			
15.	Kota Pariaman			
16.	Kota Payakumbuh			
17.	Kota Sawahlunto			
18.	Kota Solok			
19.	Sijunjung			
<p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Kesehatan
01.	Kepulauan Mentawai	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya infrastruktur pendukung untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan; <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan infrastruktur pendukung. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pembangunan infrastruktur; • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Perhubungan; - Kementerian Kesehatan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. - Pemerintah Daerah.
02.	Sijunjung	Sedang	Prioritas 2	
03.	Solok Selatan			
04.	Agam	Tinggi	Prioritas 3	
05.	Dharmasraya			
06.	Kota Bukittinggi			
07.	Kota Padang			
08.	Kota Padang Panjang			
09.	Kota Pariaman			
10.	Kota Payakumbuh			
11.	Kota Sawahlunto			
12.	Kota Solok			
13.	Lima Puluh Kota			
14.	Padang Pariaman			
15.	Pasaman			
16.	Pasaman Barat			
17.	Pesisir Selatan			
18.	Solok			
19.	Tanah Datar			

Legenda:
■ Rendah
■ Sedang
■ Tinggi

Sumber: Diolah dari berbagai sumber. Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Kesehatan
01.	Dharmasraya	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya kepemilikan BPJS kesehatan. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi BPJS kesehatan. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan BPJS kesehatan. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Kesehatan; - Pemerintah Daerah.
02.	Kota Bukittinggi			
03.	Kota Padang Panjang			
04.	Lima Puluh Kota			
05.	Padang Pariaman			
06.	Pesisir Selatan			
07.	Solok			
08.	Solok Selatan			
09.	Agam	Sedang	Prioritas 2	
10.	Kepulauan Mentawai			
11.	Kota Padang			
12.	Kota Pariaman			
13.	Kota Payakumbuh			
14.	Kota Sawahlunto			
15.	Kota Solok			
16.	Pasaman			
17.	Pasaman Barat			
18.	Sijunjung			
19.	Tanah Datar			

Legenda:
■ Rendah
■ Sedang
■ Tinggi

Sumber: Diolah dari berbagai sumber. Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keberlanjutan - Tematik Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keberlanjutan - Tematik Kesehatan
01.	Agam	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya perguruan tinggi/akademi di daerah yang memiliki jurusan bidang kesehatan. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan SDM kesehatan. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dan/atau peningkatan kuantitas dan kualitas jurusan bidang kesehatan pada perguruan tinggi/akademi di daerah. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Kesehatan; - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi; - Pemerintah Daerah.
02.	Dharmasraya			
03.	Kepulauan Mentawai			
04.	Kota Padang Panjang			
05.	Kota Payakumbuh			
06.	Kota Sawahlunto			
07.	Kota Solok			
08.	Lima Puluh Kota			
09.	Padang Pariaman			
10.	Pasaman			
11.	Pasaman Barat			
12.	Pesisir Selatan			
13.	Sijunjung			
14.	Solok			
15.	Solok Selatan			
16.	Tanah Datar			
17.	Kota Bukittinggi	Sedang	Prioritas 3	
18.	Kota Pariaman	Sedang	Prioritas 3	
19.	Kota Padang	Tinggi	Prioritas 3	

Legenda
■ Rendah
■ Sedang
■ Tinggi

Sumber: Diolah dari berbagai sumber. Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Kesehatan
01.	Dharmasraya	Sedang	Prioritas 2	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks resiko bencana di beberapa kabupaten/kota relatif tinggi. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi bencana. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
02.	Kepulauan Mentawai			
03.	Kota Bukittinggi			
04.	Kota Padang Panjang			
05.	Kota Payakumbuh			
06.	Kota Sawahlunto			
07.	Kota Solok			
08.	Lima Puluh Kota			
09.	Sijunjung			
10.	Solok			
11.	Solok Selatan			
12.	Tanah Datar			
13.	Agam	Tinggi	Prioritas 3	
14.	Kota Padang			
15.	Kota Pariaman			
16.	Padang Pariaman			
17.	Pasaman			
18.	Pasaman Barat			
19.	Pesisir Selatan			
<p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.3

Tematik:

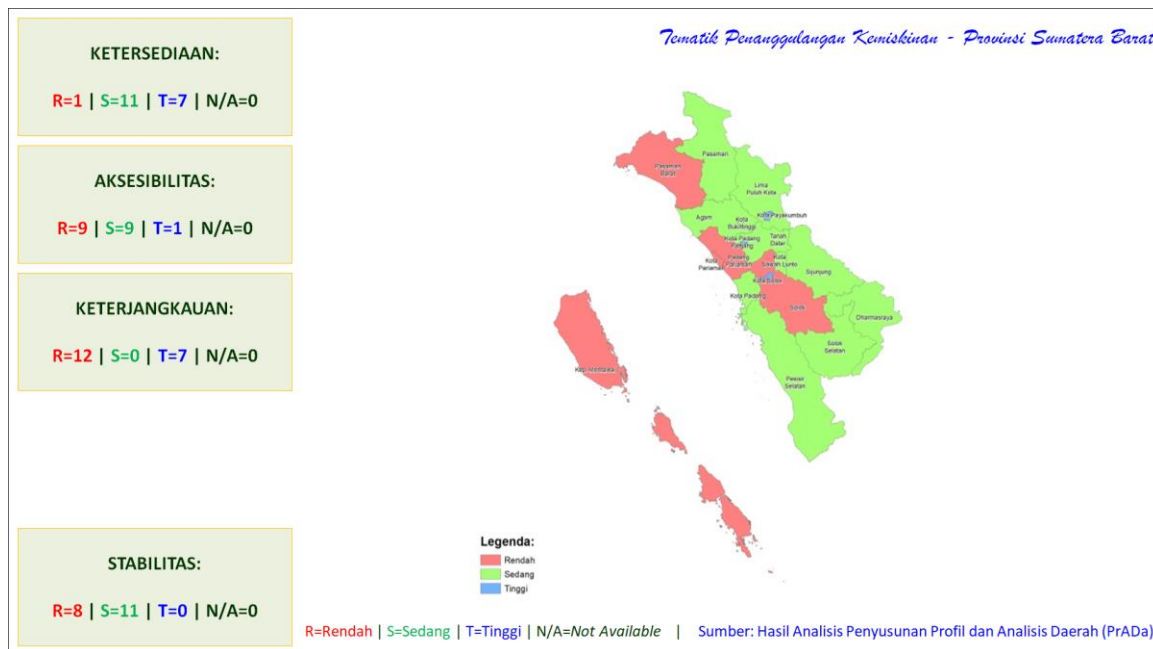
Penanggulangan Kemiskinan

Provinsi Sumatera Barat



Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penduduk miskin 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase kemiskinan (P0); • Indeks kedalaman kemiskinan (P1); • Indeks keparahan kemiskinan (P2).
<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase jumlah anak miskin yang bersekolah; • Presentase individu miskin yang memiliki penyakit kronis; • Presentase Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memiliki rumah milik sendiri atau kontrak/sewa; • Presentase RTM yang menggunakan air minum layak; • Presentase RTM yang menggunakan jamban sendiri/bersama; • Presentase RTM yang menggunakan penerangan listrik (PLN dan non PLN); • Kondisi jalan mantab.
<ul style="list-style-type: none"> • Keterjangkauan 	<ul style="list-style-type: none"> • Luas Layanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Program Keluarga Harapan (PKH); • Target PKH; • Presentase penerima PKH.
<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Resiko bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota.

Hasil Analisis Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat



No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Penanggulangan Kemiskinan
01.	Kepulauan Mentawai	Rendah	Prioritas 1	<p>RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p>PENANGGULANGAN KEMISKINAN</p> <p>KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p>SUMATERA BARAT</p> <p>DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI</p> <p>KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS,</p> <p>RELATIF</p> <p>SEDANG</p> <p>RENDAH : 5 KABUPATEN/KOTA</p> <p>SEDANG : 11 KABUPATEN/KOTA</p> <p>TINGGI : 3 KABUPATEN/KOTA</p>
02.	Padang Pariaman			
03.	Pasaman Barat			
04.	Solok			
05.	Kota Pariaman			
06.	Agam	Sedang	Prioritas 2	
07.	Dharmasraya			
08.	Lima Puluh Kota			
09.	Pasaman			
10.	Pesisir Selatan			
11.	Sijunjung			
12.	Solok Selatan			
13.	Tanah Datar			
14.	Kota Bukittinggi			
15.	Kota Padang			
16.	Kota Sawah Lunto			
17.	Kota Padang Panjang	Tinggi	Prioritas 3	
18.	Kota Payakumbuh			
19.	Kota Solok			
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan
01.	Kepulauan Mentawai	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tingginya persentase penduduk miskin, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di beberapa kabupaten/kota. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan sosial; Perlindungan dan jaminan sosial; Penanganan fakir miskin. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat; Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT); Perlindungan sosial korban bencana alam; Perlindungan sosial korban bencana sosial; Jaminan sosial keluarga; Penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Sosial; Pemerintah Daerah.
02.	Agam	Sedang	Prioritas 2	
03.	Dharmasraya			
04.	Lima Puluh Kota			
05.	Padang Pariaman			
06.	Pasaman			
07.	Pasaman Barat			
08.	Pesisir Selatan			
09.	Sijunjung			
10.	Solok			
11.	Solok Selatan			
12.	Kota Bukittinggi			
13.	Tanah Datar			
14.	Kota Padang			
15.	Kota Padang Panjang			
16.	Kota Pariaman			
17.	Kota Payakumbuh			
18.	Kota Sawah Lunto			
19.	Kota Solok			


Legenda:
■ Rendah
■ Sedang
■ Tinggi

Sumber: Diolah dari berbagai sumber. Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Penanggulangan Kemiskinan
01.	Kepulauan Mentawai	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar masih perlu ditingkatkan, di beberapa kabupaten/kota. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dasar dan menengah; Penguatan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional; Pembinaan pelayanan kesehatan; Pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman; Pengembangan perumahan; Peningkatan layanan ketenagalistrikan. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Pemberian bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP); Pengembangan pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS); Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan; Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); Pembangunan rumah susun; Penyediaan sanitasi layak; Peningkatan listrik desa. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) - Persero; Pemerintah Daerah.
02.	Lima Puluh Kota			
03.	Pasaman			
04.	Pasaman Barat			
05.	Pesisir Selatan			
06.	Sijunjung			
07.	Solok			
08.	Kota Pariaman			
09.	Kota Sawah Lunto			
10.	Agam	Sedang	Prioritas 2	
11.	Dharmasraya			
12.	Padang Pariaman			
13.	Solok Selatan			
14.	Tanah Datar			
15.	Kota Bukittinggi			
16.	Kota Padang			
17.	Kota Padang Panjang			
18.	Kota Payakumbuh			
19.	Kota Solok	Tinggi	Prioritas 3	
<p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan
01.	Dharmasraya	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan dan jaminan sosial. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan tata kelola program perlindungan dan jaminan sosial; - Peningkatan pengawasan pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Sosial; - Pemerintah Daerah.
02.	Kepulauan Mentawai			
03.	Padang Pariaman			
04.	Pasaman Barat			
05.	Solok			
06.	Solok Selatan			
07.	Tanah Datar			
08.	Kota Bukittinggi			
09.	Kota Padang			
10.	Kota Pariaman			
11.	Kota Sawah Lunto			
12.	Kota Solok			
13.	Agam	Tinggi	Prioritas 3	
14.	Lima Puluh Kota			
15.	Pasaman			
16.	Pesisir Selatan			
17.	Sijunjung			
18.	Kota Padang Panjang			
19.	Kota Payakumbuh			
 <p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Penanggulangan Kemiskinan
01.	Agam	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks resiko bencana di beberapa kabupaten/kota relatif tinggi. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi bencana. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
02.	Kepulauan Mentawai			
03.	Padang Pariaman			
04.	Pasaman			
05.	Pasaman Barat			
06.	Pesisir Selatan			
07.	Kota Padang			
08.	Kota Pariaman			
09.	Dharmasraya	Sedang	Prioritas 2	
10.	Lima Puluh Kota			
11.	Sijunjung			
12.	Solok			
13.	Solok Selatan			
14.	Tanah Datar			
15.	Kota Bukittinggi			
16.	Kota Padang Panjang			
17.	Kota Payakumbuh			
18.	Kota Sawah Lunto			
19.	Kota Solok			
<p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.4

Tematik:

Perumahan dan Permukiman

Provinsi Sumatera Barat

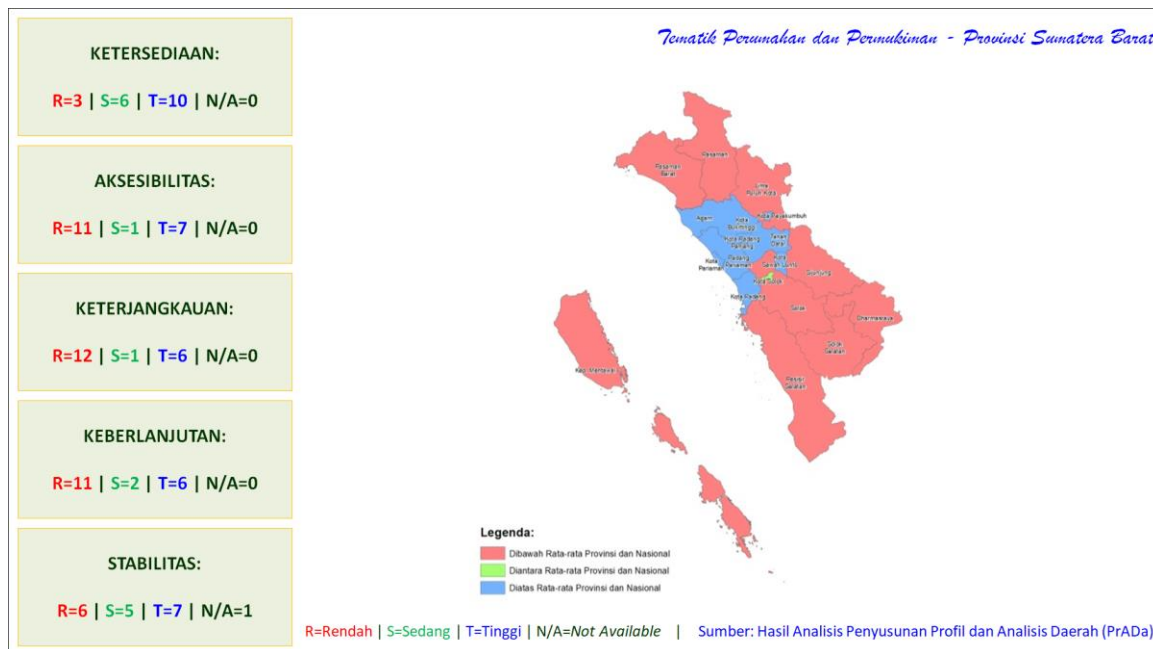


Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Persampahan • Ruang publik • Angkutan umum • Telekomunikasi • Jasa ekspedisi • Pertokoan • Keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat buang sampah sebagian besar keluarga; • Tempat penampungan sampah sementara (TPS). • Keberadaan ruang publik bagi warga untuk bersantai atau bermain tanpa perlu membayar. • Keberadaan angkutan umum yang melewati desa atau kelurahan; • Operasional angkutan umum yang melewati desa atau kelurahan; • Jam operasi angkutan umum yang melewati desa atau kelurahan. • Keberadaan telepon koin dan kartu yang masih aktif atau berfungsi; • Keberadaan base transceiver station (BTS) atau menara telepon seluler; • Kondisi sinyal telepon seluler atau handphone. • Keberadaan warung internet (warnet) di desa atau kelurahan; • kantor pos, pos pembantu, rumah pos; • Keberadaan pelayanan pos keliling; • Keberadaan perusahaan jasa ekspedisi swasta. • Keberadaan kelompok pertokoan. • Keberadaan pos polisi termasuk kantor polisi.

Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses ke sumber air untuk minum • Akses ke sumber air untuk memasak • Akses ke sumber air untuk mandi, cuci, dll. • Sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum; • Jarak tempat pembuangan limbah, kotoran, tinja dengan sumber air untuk minum. • Sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk memasak; • Jarak tempat pembuangan limbah, kotoran, tinja dengan sumber air untuk memasak. • Sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk mandi, cuci, dll; • Jarak tempat pembuangan limbah, kotoran, tinja dengan sumber air untuk mandi, cuci, dll. • Fasilitas tempat buang air besar, dan siapa saja yang menggunakan; • Jenis jamban, kloset yang digunakan rumah tangga; • Lokasi tempat pembuangan akhir tinja.
<ul style="list-style-type: none"> • Keterjangkauan 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi • Status rumah • Kondisi rumah 	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga yang berlangganan telepon kabel. • Status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati. • Bahan bangunan utama atap rumah terluas; • Bahan bangunan utama dinding rumah terluas; • Bahan bangunan utama lantai rumah terluas.

Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat		
Kategori	Komponen	Indikator
	<ul style="list-style-type: none"> ● Air isi ulang ● Perpipahan ● Penerangan ● Energi memasak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Cara memperoleh air minum yang bersumber dari air kemasan bermerk, air isi ulang dan leding eceran. ● Sumber air minum, mandi, cuci, memasak menggunakan perpipaan atau hidran umum. ● Sumber penerangan utama rumah. ● Jenis bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak.
<ul style="list-style-type: none"> ● Keberlanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Limbah ● Wilayah sutet ● Permukiman kumuh ● Modal sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ● Keberadaan permukiman di bantaran sungai; ● Pembuangan limbah pabrik, industri, usaha ke sungai. ● Keberadaan wilayah desa atau kelurahan yang dilalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet). ● Keberadaan permukiman kumuh di desa atau kelurahan. ● Keberadaan kebiasaan gotong royong warga di desa atau kelurahan.
<ul style="list-style-type: none"> ● Stabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mitigasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ● Keberadaan sistem peringatan dini bencana alam di desa atau kelurahan; ● Keberadaan perlengkapan keselamatan jika terjadi bencana alam di desa atau kelurahan; ● Keberadaan jalur evakuasi jika terjadi bencana alam di desa atau kelurahan.

Hasil Analisis Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat



No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Perumahan dan Permukiman
01.	Dharmasraya	Rendah	Prioritas 1	<p>RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p>PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</p> <p>KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p>SUMATERA BARAT</p> <p>DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI</p> <p>KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS,</p> <p>RELATIF</p> <p>RENDAH</p> <p>RENDAH : 9 KABUPATEN/KOTA</p> <p>SEDANG : 1 KABUPATEN/KOTA</p> <p>TINGGI : 9 KABUPATEN/KOTA</p>
02.	Kepulauan Mentawai			
03.	Lima Puluh Kota			
04.	Pasaman			
05.	Pasaman Barat			
06.	Pesisir Selatan			
07.	Sijunjung			
08.	Solok			
09.	Solok Selatan			
10.	Kota Solok	Sedang	Prioritas 2	
11.	Agam	Tinggi	Prioritas 3	
12.	Padang Pariaman			
13.	Tanah Datar			
14.	Kota Bukittinggi			
15.	Kota Padang			
16.	Kota Padang Panjang			
17.	Kota Pariaman			
18.	Kota Payakumbuh			
19.	Kota Sawah Lunto			
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Perumahan dan Permukiman			
01.	Kepulauan Mentawai	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke dalam lubang, sungai, saluran irigasi, danau, laut, got dan selokan; Terbatasnya ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS); Masih minimnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung kawasan perumahan dan permukiman untuk keperluan transportasi publik, telekomunikasi, ekspedisi, pertokoan/pasar, serta peningkatan keamanan di desa/kelurahan. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan fasilitas pendukung kawasan perumahan dan permukiman. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle); Penyediaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); Penyediaan prasarana dan sarana untuk keperluan transportasi publik, telekomunikasi, ekspedisi, pertokoan/pasar, serta peningkatan keamanan di desa/kelurahan. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Perdagangan; Kementerian Perindustrian; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pemerintah Daerah. 			
02.	Pesisir Selatan				Rendah	Prioritas 1	
03.	Solok Selatan						
04.	Dharmasraya	Sedang	Prioritas 2				
05.	Lima Puluh Kota						
06.	Sijunjung						
07.	Solok						
08.	Tanah Datar						
09.	Kota Pariaman						
10.	Agam	Tinggi	Prioritas 3				
11.	Padang Pariaman						
12.	Pasaman						
13.	Pasaman Barat						
14.	Kota Bukittinggi						
15.	Kota Padang						
16.	Kota Padang Panjang						
17.	Kota Payakumbuh						
18.	Kota Sawah Lunto						
19.	Kota Solok						

Legenda:

- Dibawah Rata-rata Provinsi dan Nasional
- Diantara Rata-rata Provinsi dan Nasional
- Diatas Rata-rata Provinsi dan Nasional

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Perumahan dan Permukiman
01.	Dharmasraya	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih banyak rumah tangga yang memiliki akses ke sumber air minum utama yang berasal dari (1) sumur bor/pompa, mata air terlindung, yang jaraknya kurang dari 10 meter; (2) mata air tak terlindung, air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi); Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas buang air besar, karena faktor sosial budaya, atau dikarenakan tidak adanya fasilitas tempat buang air besar; Terbatasnya lokasi pembuangan akhir tinja yang menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan akhirnya di buang ke kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, dan lainnya. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses ke sumber air untuk minum dan sanitasi layak. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses sumber air untuk minum bagi rumah tangga yang berasal dari leding; Optimalisasi ketersediaan air baku; Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); Meningkatkan pelayanan kepada rumah tangga dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat; Membangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala komunal; Meningkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja melalui pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT). Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Kesehatan; BUMN/BUMD; Pemerintah Daerah.
02.	Kepulauan Mentawai			
03.	Lima Puluh Kota			
04.	Padang Pariaman			
05.	Pasaman			
06.	Pasaman Barat			
07.	Pesisir Selatan			
08.	Sijunjung			
09.	Solok			
10.	Solok Selatan			
11.	Kota Solok			
12.	Kota Pariaman	Sedang	Prioritas 2	
13.	Agam	Tinggi	Prioritas 3	
14.	Tanah Datar			
15.	Kota Bukittinggi			
16.	Kota Padang			
17.	Kota Padang Panjang			
18.	Kota Payakumbuh			
19.	Kota Sawah Lunto			
<p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Perumahan dan Permukiman
01.	Agam	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kualitas bangunan rumah sebagai tempat perlindungan dari panas dan hujan, seperti (1) bahan bangunan utama atap rumah terluas berasal dari asbes, seng, bambu, kayu/sirap, jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia, dan lainnya; (2) bahan bangunan utama dinding rumah terluas berasal dari plesteran anyaman bambu / kawat, kayu, anyaman bambu, batang kayu, dan bambu; (3) bahan bangunan utama lantai rumah terluas berasal dari bambu, kayu / papan kualitas rendah, tanah, dan lainnya; Masih terbatasnya rumah tangga yang menggunakan sumber air untuk minum, memasak, mandi dan cuci, berasal dari perpipahan atau hidran umum; Masih terbatasnya rumah tangga yang menggunakan penerangan utama rumah berasal dari listrik; Masih banyak rumah tangga yang menggunakan bahan bakar utamanya berasal dari kayu bakar. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Bantuan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; Memperluas jaringan distribusi air bersih bagi rumah tangga; Subsidi listrik bagi masyarakat berpenghasilan rendah; Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Pemerintah Daerah.
02.	Dharmasraya			
03.	Kepulauan Mentawai			
04.	Lima Puluh Kota			
05.	Padang Pariaman			
06.	Pasaman			
07.	Pasaman Barat			
08.	Pesisir Selatan			
09.	Sijunjung			
10.	Solok			
11.	Solok Selatan			
12.	Tanah Datar			
13.	Kota Pariaman	Sedang	Prioritas 2	
14.	Kota Bukittinggi	Tinggi	Prioritas 3	
15.	Kota Padang			
16.	Kota Padang Panjang			
17.	Kota Payakumbuh			
18.	Kota Sawah Lunto			
19.	Kota Solok			
 <p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keberlanjutan - Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keberlanjutan - Tematik Perumahan dan Permukiman
01.	Dharmasraya	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat permukiman di bantaran sungai; • Banyak rumah tangga dan industri yang membuang limbah ke sungai; • Terdapat wilayah desa atau kelurahan yang dilalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet); • Terdapat permukiman kumuh di desa atau kelurahan. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Relokasi permukiman penduduk dan pemberdayaan masyarakat. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Relokasi permukiman dari bantaran sungai dan kumuh; - Pembangunan sistem pengelolaan limbah terppadu. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Pemerintah Daerah.
02.	Kepulauan Mentawai			
03.	Pasaman			
04.	Pasaman Barat			
05.	Pesisir Selatan			
06.	Sijunjung			
07.	Solok Selatan			
08.	Kota Padang			
09.	Kota Padang Panjang			
10.	Kota Sawah Lunto			
11.	Kota Solok			
12.	Solok	Sedang	Prioritas 2	
13.	Kota Pariaman			
14.	Agam	Tinggi	Prioritas 3	
15.	Lima Puluh Kota			
16.	Padang Pariaman			
17.	Tanah Datar			
18.	Kota Bukittinggi			
19.	Kota Payakumbuh			

Legenda:
■ Rendah
■ Sedang
■ Tinggi

Sumber: Diolah dari berbagai sumber. Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Perumahan dan Permukiman
01.	Kota Solok	N/A	-	
02.	Dharmasraya	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimnya keberadaan sistem peringatan dini bencana alam di desa atau kelurahan; • Minimnya keberadaan perlengkapan keselamatan jika terjadi bencana alam di desa atau kelurahan; • Minimnya keberadaan jalur evakuasi jika terjadi bencana alam di desa atau kelurahan. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi bencana. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
03.	Lima Puluh Kota			
04.	Pasaman			
05.	Sijunjung			
06.	Kota Payakumbuh			
07.	Kota Sawah Lunto			
08.	Agam			
09.	Pesisir Selatan			
10.	Solok			
11.	Solok Selatan			
12.	Kota Bukittinggi			
13.	Kepulauan Mentawai	Tinggi	Prioritas 3	
14.	Padang Pariaman			
15.	Pasaman Barat			
16.	Tanah Datar			
17.	Kota Padang			
18.	Kota Padang Panjang			
19.	Kota Pariaman			
 <p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.5

Tematik:

Ketahanan Pangan

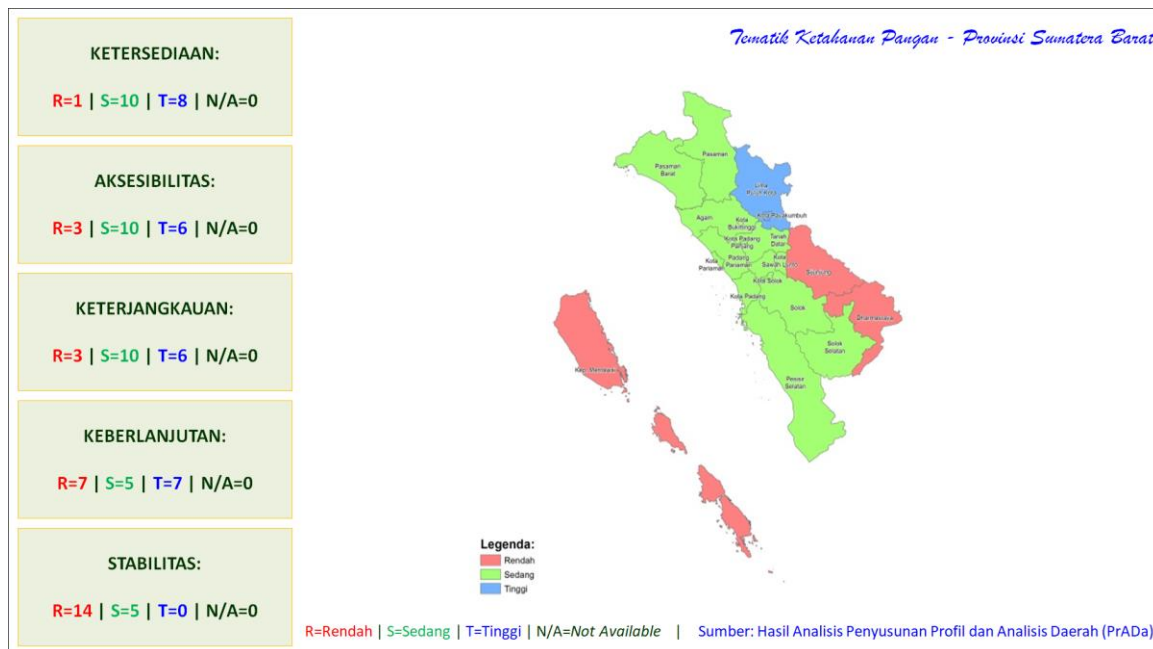
Provinsi Sumatera Barat



Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas pangan • Produksi perikanan • Produksi peternakan • Konsumsi sereal • Lahan irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas padi sawah; • Produktivitas padi ladang; • Produktivitas jagung; • Produktivitas kacang hijau; • Produktivitas kacang tanah; • Produktivitas kedelai; • Produktivitas ubi kayu; • Produktivitas ubi jalar. • Produksi perikanan tangkap; • Produksi perikanan budidaya. • Produksi unggas; • Produksi ternak. • Konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih sereal. • Rasio luas lahan sawah, tegal/kebun, ladang/huma terhadap luas wilayah; • Rasio luas sawah irigasi dibandingkan luas total sawah.
<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur • Akses ke pasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks kepadatan jalan; • Jalan mantab; • Rasio desa dengan bangunan pasar permanen/semi permanen; • Rata-rata perkiraan jarak ke pasar dengan bangunan permanen/semi permanen terdekat.

Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Keterjangkauan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan • Pengeluaran perkapita • Konsumsi pangan • Kesehatan bayi 	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kemiskinan; • Indeks kedalaman kemiskinan (P1); • Indeks keparahan kemiskinan (P2). • Pengeluaran perkapita. • Konsumsi kalori per kapita; • Konsumsi protein per kapita. • Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR); • Bayi Gizi Buruk.
<ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga kerja • Lahan pertanian • Populasi peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio rumah tangga tanaman pangan (RTTP); • Rasio rumah tangga perikanan budidaya; • Rasio rumah tangga perikanan tangkap. • Rasio luas lahan terhadap RTTP; • Laju konversi lahan pertanian rata-rata (dalam 5 tahun atau lebih). • Populasi ternak; • Populasi unggas.
<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Mitigasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerawanan bencana banjir; • Kerawanan bencana tanah longsor; • Kerawanan bencana cuaca ekstrem; • Kerawanan bencana kekeringan.

Hasil Analisis Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat




No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Ketahanan Pangan
01.	Kepulauan Mentawai	Rendah	Prioritas 1	<p style="text-align: center;">RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p style="text-align: center;">KETAHANAN PANGAN</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">SUMATERA BARAT</p> <p style="text-align: center;">DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI</p> <p style="text-align: center;">KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS,</p> <p style="text-align: center;">RELATIF</p> <p style="text-align: center;">SEDANG</p> <p style="text-align: center;">RENDAH : 3 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">SEDANG : 14 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">TINGGI : 2 KABUPATEN/KOTA</p>
02.	Sijunjung			
03.	Dharmasraya			
04.	Pesisir Selatan	Sedang	Prioritas 2	
05.	Solok			
06.	Tanah Datar			
07.	Padang Pariaman			
08.	Agam			
09.	Pasaman			
10.	Solok Selatan			
11.	Pasaman Barat			
12.	Kota Padang			
13.	Kota Solok			
14.	Kota Sawahlunto			
15.	Kota Padang Panjang			
16.	Kota Bukittinggi			
17.	Kota Pariaman			
18.	Lima Puluh Kota	Tinggi	Prioritas 3	
19.	Kota Payakumbuh			
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Ketahanan Pangan
01.	Kepulauan Mentawai	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya produktivitas padi sawah, padi ladang, jagung, kacang hijau, kacang tanah, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar; • Rendahnya produksi perikanan tangkap/budidaya; • Rendahnya produksi unggas/ternak; • Konsumsi sereralia lebih tinggi dibandingkan produksi di dalam kabupaten/kota; • Rendahnya persentase luas lahan sawah, tegal/kebun, ladang/huma terhadap luas wilayah; • Rendahnya rasio sawah irigasi terhadap luas lahan sawah total. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Ketahanan pangan. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan produksi hasil pertanian; - Penerapan teknologi pertanian; - Pemberdayaan penyuluh pertanian; - Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya perikanan; - Peningkatan produksi peternakan dan penerapan teknologi peternakan; - Peningkatan ketahanan pangan; - Pembukaan sawah dan pembuatan saluran irigasi. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pertanian; - Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Pemerintah Daerah.
02.	Tanah Datar	Sedang	Prioritas 2	
03.	Pasaman			
04.	Solok Selatan			
05.	Dharmasraya			
06.	Kota Solok			
07.	Kota Sawahlunto			
08.	Kota Padang Panjang			
09.	Kota Bukittinggi			
10.	Kota Payakumbuh			
11.	Kota Pariaman			
12.	Solok			
13.	Sijunjung			
14.	Pesisir Selatan			
15.	Padang Pariaman			
16.	Agam			
17.	Lima Puluh Kota			
18.	Pasaman Barat			
19.	Kota Padang			
<p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Ketahanan Pangan		
01.	Kepulauan Mentawai	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kepadatan jalan (panjang ruas jalan per 100 km² luas wilayah); • Rendahnya rasio jalan mantab; • Tingginya rasio desa tanpa bangunan permanen maupun semi permanen; • Jarak rata-rata desa ke pasar permanen/semi permanen terdekat terlampau jauh. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Ketahanan pangan. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan, pemeliharaan jalan; - Pembangunan pasar permanen/semi permanen; - Rehabilitasi bangunan pasar. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pertanian; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Perdagangan; - Pemerintah Daerah. 		
02.	Pesisir Selatan				Sedang	Prioritas 2
03.	Solok Selatan					
04.	Solok					
05.	Sijunjung	Tinggi	Prioritas 3			
06.	Tanah Datar					
07.	Padang Pariaman					
08.	Agam					
09.	Pasaman					
10.	Dharmasraya					
11.	Pasaman Barat					
12.	Kota Padang					
13.	Kota Sawahlunto					
14.	Lima Puluh Kota	Tinggi	Prioritas 3			
15.	Kota Solok					
16.	Kota Padang Panjang					
17.	Kota Bukittinggi					
18.	Kota Payakumbuh					
19.	Kota Pariaman					
 <p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>						
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)		


Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Ketahanan Pangan			
01.	Kepulauan Mentawai	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya angka kemiskinan; • Tingginya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan; • Pengeluaran per kapita di wilayah kabupaten/kota masih berada di bawah rata-rata provinsi; • Rendahnya konsumsi kalori dan protein per kapita; • Tingginya persentase bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Penanggulangan kemiskinan. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan bantuan sosial bagi masyarakat miskin, khususnya yang bekerja di sektor pertanian; - Peningkatan kesehatan ibu dan bayi. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Sosial; - Kementerian Kesehatan; - Pemerintah Daerah. 			
02.	Sijunjung						
03.	Padang Pariaman						
04.	Pesisir Selatan	Sedang	Prioritas 2				
05.	Solok						
06.	Tanah Datar						
07.	Agam						
08.	Lima Puluh Kota						
09.	Solok Selatan						
10.	Dharmasraya						
11.	Pasaman Barat						
12.	Kota Padang Panjang						
13.	Kota Pariaman						
14.	Pasaman	Tinggi	Prioritas 3				
15.	Kota Padang						
16.	Kota Solok						
17.	Kota Sawahlunto						
18.	Kota Bukittinggi						
19.	Kota Payakumbuh						
<p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>							
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)			

Hasil Analisis Kategori Keberlanjutan - Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keberlanjutan - Tematik Ketahanan Pangan
01.	Sijunjung	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya persentase rumah tangga tanaman pangan, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap; • Rendahnya penguasaan lahan pertanian; • Tingginya laju konversi lahan pertanian; • Masih tingginya lahan potensial yang menganggur; • Rendahnya populasi ternak dan unggas. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan; • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kesejahteraan petani; - Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; - Penataan ruang; - Pemberian bibit ternak dan unggas; - Penanggulangan penyakit ternak dan unggas. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pertanian; - Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Kementerian Agraria dan Tata Ruang; - Pemerintah Daerah.
02.	Agam			
03.	Dharmasraya			
04.	Kota Padang			
05.	Kota Padang Panjang			
06.	Kota Bukittinggi			
07.	Kota Pariaman			
08.	Pesisir Selatan	Sedang	Prioritas 2	
09.	Solok			
10.	Tanah Datar			
11.	Padang Pariaman			
12.	Pasaman			
13.	Kepulauan Mentawai	Tinggi	Prioritas 3	
14.	Lima Puluh Kota			
15.	Solok Selatan			
16.	Pasaman Barat			
17.	Kota Solok			
18.	Kota Sawahlunto			
19.	Kota Payakumbuh			
 <p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Ketahanan Pangan
01.	Kepulauan Mentawai	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kerawanan bencana banjir; • Tingginya Kerawanan bencana Tanah longsor; • Tingginya Kerawanan bencana cuaca ekstrim; • Tingginya Kerawanan bencana kekeringan. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi bencana. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
02.	Pesisir Selatan			
03.	Solok			
04.	Padang Pariaman			
05.	Agam			
06.	Lima Puluh Kota			
07.	Pasaman			
08.	Solok Selatan			
09.	Dharmasraya			
10.	Pasaman Barat			
11.	Kota Padang			
12.	Kota Sawahlunto			
13.	Kota Bukittinggi			
14.	Kota Pariaman			
15.	Sijunjung	Sedang	Prioritas 2	
16.	Tanah Datar			
17.	Kota Solok			
18.	Kota Padang Panjang			
19.	Kota Payakumbuh			
 <p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.6

Tematik:

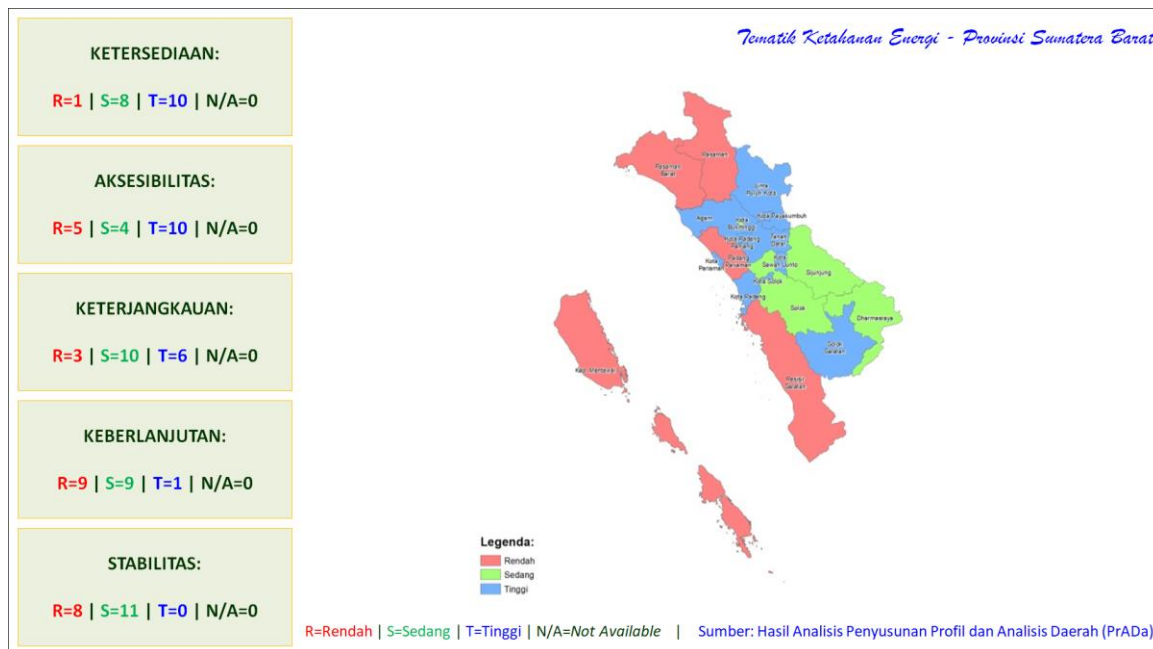
Ketahanan Energi

Provinsi Sumatera Barat



Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Ketahanan Energi Provinsi Sumatera Barat		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan 		<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga pengguna listrik PLN; • Penerangan di jalan utama desa/ kelurahan (listrik diusahakan pemerintah).
<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas 		<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga pengguna listrik PLN; • Keluarga pengguna listrik Non PLN; • Penerangan di jalan utama desa/ kelurahan; • Penerangan di jalan utama desa/ kelurahan, listrik diusahakan pemerintah; • Penerangan di jalan utama desa/ kelurahan (listrik diusahakan non pemerintah).
<ul style="list-style-type: none"> • Keterjangkauan 		<ul style="list-style-type: none"> • Bahan Bakar untuk memasak yang digunakan sebagian besar keluarga (gas kota, LPG, minyak tanah, kayu bakar); • Keluarga tanpa listrik; • Tidak ada penerangan di jalan utama desa/kelurahan.
<ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan 		<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga pengguna listrik PLN • Penerangan di jalan utama desa/ kelurahan (listrik diusahakan non pemerintah)
<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas 		<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota.

Hasil Analisis Tematik Ketahanan Energi Provinsi Sumatera Barat



No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Ketahanan Energi
01.	Kepulauan Mentawai	Rendah	Prioritas 1	<p style="text-align: center;">RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p style="text-align: center;">KETAHANAN ENERGI</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">SUMATERA BARAT</p> <p style="text-align: center;">DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI</p> <p style="text-align: center;">KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN,</p> <p style="text-align: center;">KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS,</p> <p style="text-align: center;">RELATIF</p> <p style="text-align: center;">TINGGI</p> <p style="text-align: center;">RENDAH : 5 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">SEDANG : 3 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">TINGGI : 11 KABUPATEN/KOTA</p>
02.	Padang Pariaman			
03.	Pasaman			
04.	Pasaman Barat			
05.	Pesisir Selatan			
06.	Dharmasraya	Sedang	Prioritas 2	
07.	Sijunjung			
08.	Solok			
09.	Agam	Tinggi	Prioritas 3	
10.	Kota Bukittinggi			
11.	Kota Padang			
12.	Kota Padang Panjang			
13.	Kota Pariaman			
14.	Kota Payakumbuh			
15.	Kota Sawahlunto			
16.	Kota Solok			
17.	Lima Puluh Kota			
18.	Solok Selatan			
19.	Tanah Datar			
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Ketahanan Energi Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Ketahanan Energi
01.	Kepulauan Mentawai	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimnya ketersediaan jaringan listrik PLN di beberapa wilayah permukiman penduduk; • Minimnya ketersediaan lampu penerangan di beberapa jalan utama. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Ketahanan energi. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jaringan distribusi listrik PLN yang dapat menjangkau permukiman penduduk; - Pemasangan lampu penerangan di jalan utama. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; - PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) - Persero; - Pemerintah Daerah.
02.	Dharmasraya	Sedang	Prioritas 2	
03.	Lima Puluh Kota			
04.	Pasaman			
05.	Pasaman Barat			
06.	Pesisir Selatan			
07.	Sijunjung			
08.	Solok			
09.	Solok Selatan			
10.	Agam			
11.	Kota Bukittinggi			
12.	Kota Padang			
13.	Kota Padang Panjang			
14.	Kota Pariaman			
15.	Kota Payakumbuh			
16.	Kota Sawahlunto			
17.	Kota Solok			
18.	Padang Pariaman			
19.	Tanah Datar			
<p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Ketahanan Energi Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Ketahanan Energi
01.	Dharmasraya	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sulitnya masyarakat mengakses listrik PLN, karena keterbatasan layanan sambungan listrik PLN; <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Ketahanan energi. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan layanan listrik PLN; Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) - Persero; Pemerintah Daerah.
02.	Kepulauan Mentawai			
03.	Padang Pariaman			
04.	Pasaman			
05.	Pasaman Barat			
06.	Kota Bukittinggi	Sedang	Prioritas 2	
07.	Kota Padang Panjang			
08.	Pesisir Selatan			
09.	Solok			
10.	Agam	Tinggi	Prioritas 3	
11.	Kota Padang			
12.	Kota Pariaman			
13.	Kota Payakumbuh			
14.	Kota Sawahlunto			
15.	Kota Solok			
16.	Lima Puluh Kota			
17.	Sijunjung			
18.	Solok Selatan			
19.	Tanah Datar			

Legenda:
■ Rendah
■ Sedang
■ Tinggi

Sumber: Diolah dari berbagai sumber. Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Ketahanan Energi Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Ketahanan Energi			
01.	Kepulauan Mentawai	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat rumah tangga yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar utama untuk memasak. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Ketahanan energi. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi penggunaan LPG dan bahan bakar efektif dan efisien untuk masyarakat. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Pemerintah Daerah. 			
02.	Padang Pariaman						
03.	Pesisir Selatan						
04.	Agam	Sedang	Prioritas 2				
05.	Dharmasraya						
06.	Kota Bukittinggi						
07.	Kota Solok						
08.	Lima Puluh Kota						
09.	Pasaman						
10.	Pasaman Barat						
11.	Sujunjung						
12.	Solok						
13.	Solok Selatan						
14.	Kota Padang	Tinggi	Prioritas 3				
15.	Kota Padang Panjang						
16.	Kota Pariaman						
17.	Kota Payakumbuh						
18.	Kota Sawahlunto						
19.	Tanah Datar						

Legenda:

- Rendah
- Sedang
- Tinggi

Sumber: Diolah dari berbagai sumber. Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keberlanjutan - Tematik Ketahanan Energi Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keberlanjutan - Tematik Ketahanan Energi
01.	Kota Bukittinggi	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Beberapa kebutuhan energi listriknya terbantu dari supply non-PLN namun masih belum mencukupi seluruh kebutuhan energi. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Ketahanan energi. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Mendorong pengembangan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh pihak swasta, untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Swasta; Pemerintah Daerah.
02.	Kota Padang			
03.	Kota Padang Panjang			
04.	Kota Pariaman			
05.	Kota Payakumbuh			
06.	Pasaman			
07.	Pasaman Barat			
08.	Sijunjung			
09.	Solok			
10.	Dharmasraya	Sedang	Prioritas 2	
11.	Kepulauan Mentawai			
12.	Kota Sawahlunto			
13.	Kota Solok			
14.	Lima Puluh Kota			
15.	Padang Pariaman			
16.	Pesisir Selatan			
17.	Solok Selatan			
18.	Tanah Datar			
19.	Agam	Tinggi	Prioritas 3	

Legenda:
■ Rendah
■ Sedang
■ Tinggi

Sumber: Diolah dari berbagai sumber. Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Ketahanan Energi Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Ketahanan Energi
01.	Agam	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks resiko bencana di beberapa kabupaten/kota relatif tinggi. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi bencana. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
02.	Kepulauan Mentawai			
03.	Kota Padang			
04.	Kota Pariaman			
05.	Padang Pariaman			
06.	Pasaman			
07.	Pasaman Barat			
08.	Pesisir Selatan			
09.	Dharmasraya	Sedang	Prioritas 2	
10.	Kota Bukittinggi			
11.	Kota Padang Panjang			
12.	Kota Payakumbuh			
13.	Kota Sawahlunto			
14.	Kota Solok			
15.	Lima Puluh Kota			
16.	Sijunjung			
17.	Solok			
18.	Solok Selatan			
19.	Tanah Datar			
 <p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.7

Tematik:

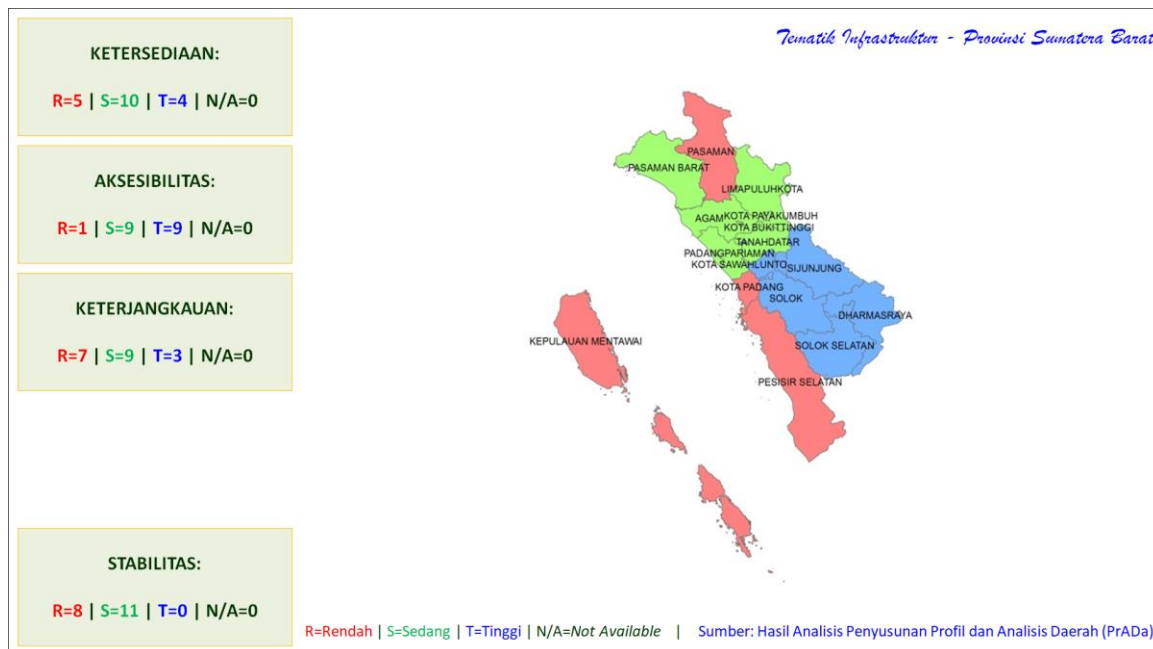
Infrastruktur

Provinsi Sumatera Barat



Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Infrastruktur Provinsi Sumatera Barat		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan 		<ul style="list-style-type: none"> • Panjang ruas jalan nasional; • Panjang ruas jalan provinsi; • Rasio irigasi.
<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas 		<ul style="list-style-type: none"> • Rasio jalan mantab nasional; • Rasio jalan mantab provinsi.
<ul style="list-style-type: none"> • Keterjangkauan 		<ul style="list-style-type: none"> • Presentase anggaran belanja infrastruktur terhadap dana APBD kabupaten/kota.
<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas 		<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota.

Hasil Analisis Tematik Infrastruktur Provinsi Sumatera Barat



No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Infrastruktur
01.	Kepulauan Mentawai	Rendah	Prioritas 1	<p style="text-align: center;">RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p style="text-align: center;">INFRASTRUKTUR</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">SUMATERA BARAT</p> <p style="text-align: center;">DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI</p> <p style="text-align: center;">KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF</p> <p style="text-align: center;">SEDANG</p> <p style="text-align: center;">RENDAH : 4 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">SEDANG : 9 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">TINGGI : 6 KABUPATEN/KOTA</p>
02.	Kota Padang			
03.	Pasaman			
04.	Pesisir Selatan			
05.	Agam	Sedang	Prioritas 2	
06.	Kota Padang Panjang			
07.	Kota Pariaman			
08.	Kota Payakumbuh			
09.	Kota Bukittinggi			
10.	Limapuluhkota			
11.	Padang Pariaman			
12.	Pasaman Barat			
13.	Tanah Datar			
14.	Dharmasraya	Tinggi	Prioritas 3	
15.	Kota Sawahlunto			
16.	Kota Solok			
17.	Sijunjung			
18.	Solok			
19.	Solok Selatan			
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Infrastruktur Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Infrastruktur
01.	Pasaman	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tingginya persentase jalan dengan permukaan tanah, kerikil dan batuan yang diperkeras; Terbatasnya jaringan telekomunikasi untuk akses informasi, khususnya di perdesaan dan daerah terpencil; <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas jalan; Peningkatan akses telekomunikasi; Pengembangan transportasi darat/laut. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas jalan beraspal; Pengembangan sistem telekomunikasi; Penyediaan dan peningkatan prasarana dan sarana penunjang pelabuhan dan dermaga. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Pemerintah Daerah.
02.	Pesisir Selatan			
03.	Kepulauan Mentawai			
04.	Kota Bukittinggi			
05.	Kota Padang			
06.	Agam	Sedang	Prioritas 2	
07.	Lima Puluh Kota			
08.	Padang Pariaman			
09.	Tanah Datar			
10.	Dharmasraya			
11.	Pasaman Barat			
12.	Kota Sawahlunto			
13.	Kota Solok			
14.	Kota Payakumbuh			
15.	Kota Pariaman			
16.	Solok	Tinggi	Prioritas 3	
17.	Sijunjung			
18.	Solok Selatan			
19.	Kota Padang Panjang			
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Infrastruktur Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Infrastruktur
01.	Kepulauan Mentawai	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Waktu tempuh cukup lama karena tekendala beberapa ruas jalan mengalami kerusakan dan belum dilakukan perbaikan; Rendahnya kondisi jalan mantab. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan pemeliharaan jalan. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas jalan dan perluasan kemantapan jalan beraspal. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Pemerintah Daerah.
02.	Pasaman	Sedang	Prioritas 2	
03.	Lima Puluh Kota			
04.	Padang Pariaman			
05.	Pesisir Selatan			
06.	Solok Selatan			
07.	Dharmasraya			
08.	Pasaman Barat			
09.	Kota Bukittinggi			
10.	Kota Padang Panjang			
11.	Agam			
12.	Solok			
13.	Tanah Datar			
14.	Sijunjung			
15.	Kota Padang			
16.	Kota Sawahlunto			
17.	Kota Solok			
18.	Kota Payakumbuh			
19.	Kota Pariaman			
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Infrastruktur Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Infrastruktur
01.	Pasaman	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya transportasi yang cukup mahal. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan sosial bagi masyarakat miskin. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan transportasi publik bagi masyarakat miskin. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Sosial; - Kementerian Perhubungan; - Pemerintah Daerah.
02.	Lima Puluh Kota			
03.	Solok			
04.	Pesisir Selatan			
05.	Tanahdatar			
06.	Kota Padang			
07.	Kota Payakumbuh			
08.	Agam	Sedang	Prioritas 2	
09.	Sijunjung			
10.	Kepulauan Mentawai			
11.	Solok Selatan			
12.	Pasaman Barat			
13.	Kota Bukittinggi			
14.	Kota Padang Panjang			
15.	Kota Sawahlunto			
16.	Kota Pariaman			
17.	Padang Pariaman	Tinggi	Prioritas 3	
18.	Dharmasraya			
19.	Kota Solok			
				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Infrastruktur Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Infrastruktur
01.	Agam	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks resiko bencana di beberapa kabupaten/kota relatif tinggi. • Minimnya keberadaan sistem peringatan dini bencana alam di desa atau kelurahan; <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi bencana. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
02.	Pasaman			
03.	Padang Pariaman			
04.	Pesisir Selatan			
05.	Kepulauan Mentawai			
06.	Pasaman Barat			
07.	Kota Padang			
08.	Kota Pariaman			
09.	Lima Puluh Kota	Sedang	Prioritas 2	
10.	Solok			
11.	Tanah Datar			
12.	Sijunjung			
13.	Solok Selatan			
14.	Dharmasraya			
15.	Kota Bukittinggi			
16.	Kota Padang Panjang			
17.	Kota Sawahlunto			
18.	Kota Solok			
19.	Kota Payakumbuh			
 <p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.8

Tematik:

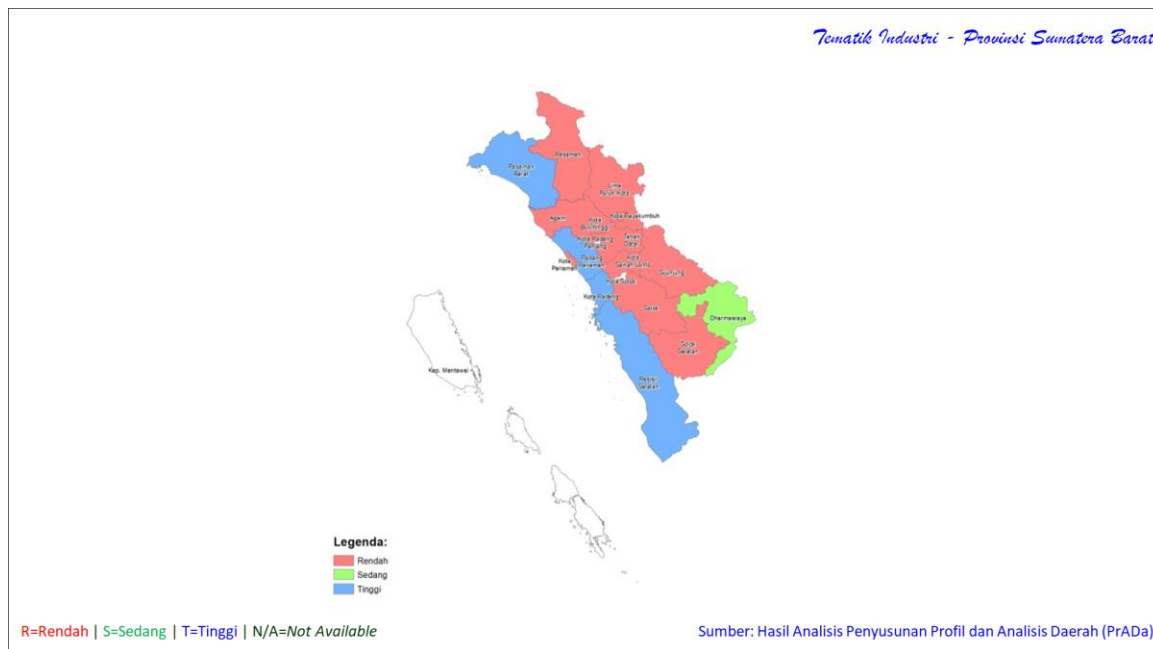
Industri, Pariwisata, dan Sektor Unggulan

Provinsi Sumatera Barat



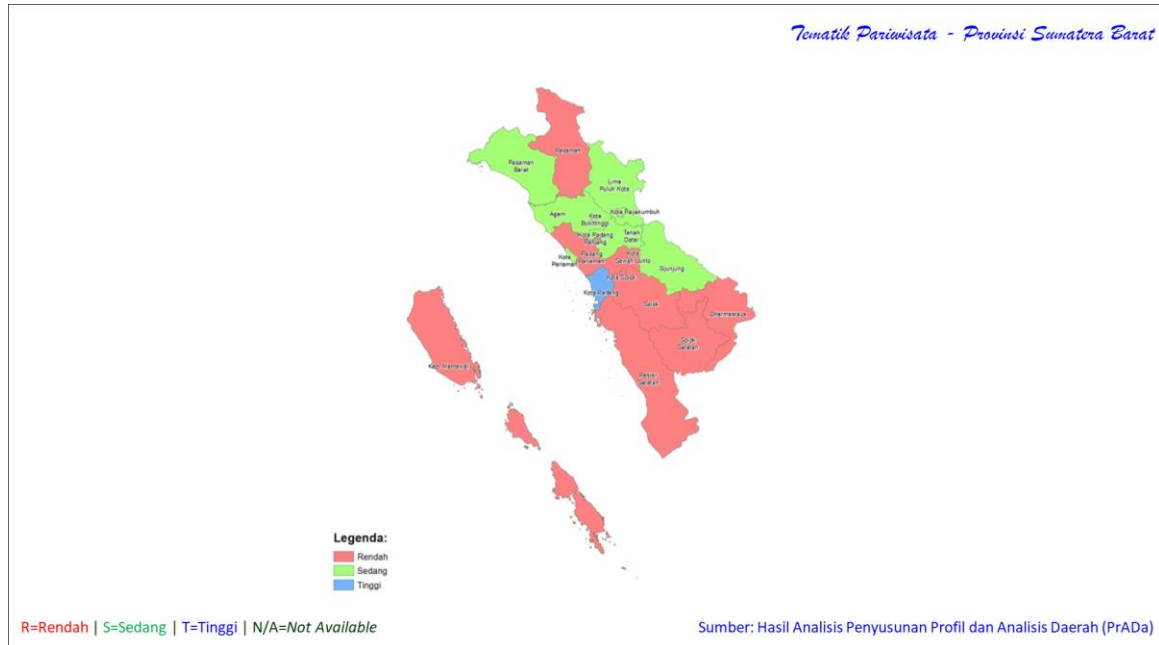
Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Industri dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat		
Kategori	Komponen	Indikator
● Industri		<ul style="list-style-type: none">● Jumlah tenaga kerja;● Nilai investasi;● Nilai produksi.
● Pariwisata		<ul style="list-style-type: none">● Akomodasi;● Jumlah kamar;● Jumlah tempat tidur;● Jumlah restoran;● Jumlah objek wisata.

Hasil Analisis Tematik Industri Provinsi Sumatera Barat



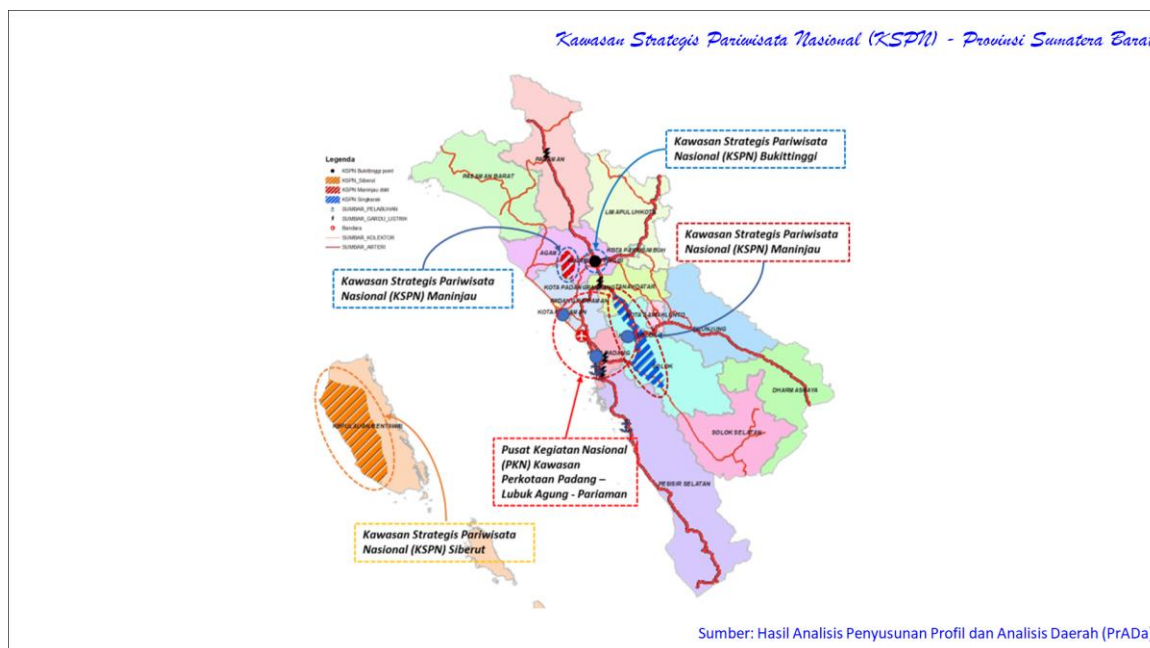
No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Industri
01.	Kepulauan Mentawai	N/A	-	<p style="text-align: center;">RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p style="text-align: center;">INDUSTRI</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">SUMATERA BARAT</p> <p style="text-align: center;">DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF</p> <p style="text-align: center;">RENDAH</p> <p style="text-align: center;">RENDAH : 11 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">SEDANG : 1 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">TINGGI : 4 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya investasi di sektor industri di beberapa kabupaten/kota. Rendahnya produksi di sektor industri di beberapa kabupaten/kota. Masih rendahnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri.
02.	Kota Padang Panjang	N/A	-	
03.	Kota Solok	N/A	-	
04.	Agam	Rendah	Prioritas 1	
05.	Lima Puluh Kota			
06.	Pasaman			
07.	Sijunjung			
08.	Solok			
09.	Solok Selatan			
10.	Tanah Datar			
11.	Kota Bukittinggi			
12.	Kota Pariaman			
13.	Kota Payakumbuh			
14.	Kota Sawah Lunto			
15.	Dharmasraya	Sedang	Prioritas 2	
16.	Padang Pariaman	Tinggi	Prioritas 3	
17.	Pasaman Barat			
18.	Pesisir Selatan			
19.	Kota Padang			
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Tematik Pariwisata Provinsi Sumatera Barat



No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Pariwisata
01.	Dharmasraya	Rendah	Prioritas 1	<p style="text-align: center;">RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p style="text-align: center;">PARIWISATA</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">SUMATERA BARAT</p> <p style="text-align: center;">DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI</p> <p style="text-align: center;">KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN,</p> <p style="text-align: center;">KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS,</p> <p style="text-align: center;">RELATIF</p> <p style="text-align: center;">RENDAH</p> <p style="text-align: center;">RENDAH : 10 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">SEDANG : 8 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">TINGGI : 1 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya penunjang sektor pariwisata, seperti ketersediaan akomodasi, restoran dan infrastruktur pendukung lainnya, di beberapa kabupaten/kota. • Masih rendahnya jumlah kunjungan wisatawan.
02.	Kepulauan Mentawai			
03.	Padang Pariaman			
04.	Pasaman			
05.	Pesisir Selatan			
06.	Solok			
07.	Solok Selatan			
08.	Kota Padang Panjang			
09.	Kota Sawah Lunto			
10.	Kota Solok			
11.	Agam	Sedang	Prioritas 2	
12.	Lima Puluh Kota			
13.	Pasaman Barat			
14.	Sijunjung			
15.	Tanah Datar			
16.	Kota Bukittinggi			
17.	Kota Pariaman			
18.	Kota Payakumbuh			
19.	Kota Padang	Tinggi	Prioritas 3	
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Provinsi Sumatera Barat



- ① Jika dilihat dari aspek kategori ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas, KSPN Bukittinggi memiliki nilai tertinggi, sementara terendah adalah KSPN Siberut yang berada di kabupaten Kepulauan Mentawai;
- ② Masih rendahnya promosi untuk mendukung pengembangan KSPN di wilayah provinsi Sumatera Barat;
- ③ Belum dikembangkannya dukungan Teknologi Informasi (IT) untuk pengembangan KSPN;
- ④ Beberapa KSPN hanya dapat ditempuh melalui jalan darat dengan waktu tempuh yang cukup lama;
- ⑤ KSPN Siberut di kabupaten Kepulauan Mentawai untuk akses melalui transportasi laut membutuhkan waktu tempuh ± 12 jam. Sementara untuk akses melalui transportasi udara, masih belum tersedia;
- ⑥ Belum dikembangkannya Balai Latihan Kerja (BLK) yang menjadi pendukung tenaga kerja di sektor pariwisata, khususnya di kabupaten Kepulauan Mentawai (KSPN Siberut) dan kota Bukittinggi (KSPN Bukittinggi);
- ⑦ Belum berkembangnya jiwa entrepreneurship masyarakat untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal sebagai pendukung sektor pariwisata;
- ⑧ Secara geografis, posisi KSPN Siberut, memiliki tingkat resiko bencana yang cukup tinggi.

Sektor Unggulan³ Provinsi Sumatera Barat

- ① Program peningkatan produksi padi tahun akan difokuskan pada intensifikasi lahan termasuk pemanfaatan teknologi, pembenihan, pengairan irigasi dan teknologi budidaya;
- ② Produksi CPO ke depan diperkirakan membaik seiring membaiknya iklim yang mendukung produksi dan dapat memengaruhi supply bahan baku ke perusahaan;
- ③ Selain CPO, peningkatan harga karet diperkirakan memberikan insentif bagi petani yang berdampak pada meningkatnya nilai tambah subsektor perkebunan;
- ④ Kinerja sektor perdagangan diperkirakan tumbuh cukup tinggi akibat adanya kegiatan perayaan keagamaan;
- ⑤ Kinerja lapangan usaha pertanian diperkirakan meningkat seiring dengan masuknya siklus panen tanaman bahan makanan dan proyeksi kenaikan harga komoditas CPO dan karet;
- ⑥ Tradisi “pulang basamo ” memberikan dampak langsung berupa peningkatan permintaan angkutan udara dan angkutan darat yang memicu peningkatan kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Berdasarkan data historis, peningkatan jumlah masyarakat minang yang mudik terkonfirmasi dari peningkatan drastis harga tiket angkutan udara sebelum dan pasca Lebaran. Tradisi ini juga memberikan dampak lanjutan berupa peningkatan paket kiriman dan lalu lintas barang antar daerah yang berdampak positif pada kinerja pergudangan. Di sisi lain rencana maskapai penerbangan Air Asia Indonesia untuk membuka rute internasional dari Singapura ke kota Padang mulai 9 Februari 2018 serta rencana pengembangan Garuda Indonesia untuk rute baru Palembang-Padang-Pekanbaru per April 2018 diperkirakan turut memberikan dampak positif pada pertumbuhan lapangan usaha transportasi;
- ⑦ Investasi kedepan diperkirakan membaik seiring realisasi investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri seperti proyek *geothermal* (Sijunjung), renovasi bandara dan pelabuhan (Padang) serta investasi untuk mendorong kinerja pariwisata di berbagai daerah.

3 Kajian Ekonomi Regional, Bank Indonesia.

Bab-5

PENUTUP



5.1. Kesimpulan

Mengacu kepada hasil analisis, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab-4 Profil dan Analisis Daerah (PrADa) tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian tematik RATA-RATA kabupaten/kota di wilayah provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- ① Pendidikan, tingkat capaian TINGGI hingga SEDANG;
- ② Kesehatan, tingkat capaian RENDAH;
- ③ Penanggulangan Kemiskinan, tingkat capaian SEDANG;
- ④ Perumahan dan Permukiman, tingkat capaian RENDAH;
- ⑤ Ketahanan Pangan, tingkat capaian SEDANG;
- ⑥ Ketahanan Energi, tingkat capaian TINGGI;
- ⑦ Infrastruktur, tingkat capaian SEDANG;
- ⑧ Industri, tingkat capaian RENDAH; dan Pariwisata, tingkat capaian RENDAH.

5.2. Rekomendasi

Profil dan Analisis Daerah (PrADa) ini, oleh para pemangku kepentingan dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk mempertajam dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang berbasis kewilayahan, utamanya dalam rangka menyusun program/kegiatan sesuai dengan isu atau permasalahan daerah, sebagaimana yang telah diuraikan dan disajikan di dalam Bab-4 Profil dan Analisis Daerah (PrADa) provinsi Sumatera Barat ini.

Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan PrADa ini, melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Metode analisis ini relatif baru dan belum memiliki banyak referensi yang dapat digunakan, utamanya dalam rangka merumuskan program/kegiatan sesuai dengan isu atau permasalahan daerah. Oleh karenanya penerapan metode THIS dalam penyusunan PrADa ini, dapat dipergunakan sebagai salah satu instrumen dalam rangka mempersiapkan penyusunan *background study* RPJMN 2020-2024, yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.